



Pemerintah
Kota Sawahlunto

**KUA
2021**



Kebijakan Umum

**Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah**

2021

Jl. Soekarno - Hatta No.3, Lubang Panjang,
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
Telp. (0754) 6109, Fax (0754) 62200
Website : Barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
E-mail : bappedaswl@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan serta sub kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan kebijakan politik pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penjabaran tahap-tahap yang terdapat dalam RKPD 2021 pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 juga lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2021 yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Sawahlunto. Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2021 mendatang. Di sisi lain, guna menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka proses penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 tetap mengacu pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 khusus yang sumber dananya direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021, selanjutnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 yang memuat arah dan tujuan pembangunan daerah selama tahun 2021 dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yang tersedia baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto, swadaya masyarakat, partisipasi sektor swasta Hibah dari pihak lain serta sumber dana lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan "Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya" Selanjutnya dinyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seterusnya dijadikan suatu kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya sebagai implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. Menjelaskan perkembangan ekonomi makro tahun 2019, perkiraan ekonomi makro tahun 2020, serta proyeksi ekonomi makro tahun 2021.
- b. Memberikan gambaran tentang rencana penerimaan daerah yang meliputi rencana pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan.
- c. Memberikan arah kebijakan penggunaan anggaran untuk belanja langsung dan belanja tak langsung.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

19. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
25. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
26. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 40).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019

Sesuai dengan Kebijakan Makro Ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2019 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2021, maka secara umum perkembangan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami perkembangan yang konsisten. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan ekonomi merupakan salah satu modal dalam pembangunan yang berkeadilan serta meningkatkan peran lapangan usaha unggulan dan kontribusi lapangan usaha perekonomian daerah.

Kondisi ekonomi makro daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi meliputi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto, struktur perekonomian daerah yang dilihat dari kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian terhadap pembentukan PDRB Kota Sawahlunto, PDRB perkapita dan lain-lain.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan takaran makro yang digunakan untuk mengamati perekonomian suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (dalam jutaan rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	KOTA SAWAHLUNTO
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	325.558,33
2	Pertambangan dan Penggalian	198.822,71
3	Industri Pengolahan	392.425,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	72.289,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.336,13
6	Konstruksi	415.700,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	553.970,68
8	Transportasi dan Pergudangan	327.281,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82.406,43
10	Informasi dan Komunikasi	275.116,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.197,84
12	Real Estate	64.826,29
13	Jasa Perusahaan	5.358,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	444.199,33
15	Jasa Pendidikan	120.753,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43.357,66
17	Jasa Lainnya	224.047,18
	Jumlah	3.681.649,00

PDRB Kota Sawahlunto atas dasar harga berlaku tahun 2019 dengan tahun dasar 2010 diperkirakan mencapai Rp. 3.681.649,00 (dalam jutaan). Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang bernilai Rp. 3.405.157,90 (dalam jutaan), dengan peningkatan diperkirakan sebesar 8,12 % di tahun 2019.

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu daerah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan

akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Pada tabel berikut dapat dilihat peranan 17 (tujuh belas) lapangan usaha dalam persentase distribusi lapangan usaha atas dasar harga berlaku.

Tabel 2.2
Struktur Ekonomi Kota Sawahlunto (persen)
Tahun 2018 dan 2019

NO	LAPANGAN USAHA	Kota Sawahlunto	
		2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,16	8,84
2	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,4
3	Industri Pengolahan	12,21	10,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,8	1,96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,39
6	Konstruksi	11,21	11,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,99	15,05
8	Transportasi dan Pergudangan	8,68	8,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,1	2,24
10	Informasi dan Komunikasi	7,1	7,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	3,29
12	Real Estate	1,8	1,76
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	11,87	12,07
15	Jasa Pendidikan	3,09	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18
17	Jasa Lainnya	5,75	6,09
	Jumlah	100	100

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto, 2020

Berikut dapat diuraikan kontribusi masing-masing lapangan usaha lapangan usaha dalam struktur ekonomi PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sawahlunto Tahun 2018-2019. Sampai tahun 2019, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Sawahlunto didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Sawahlunto sebesar 15,05%. Kemudian

diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial sebesar 12,07 % dan lapangan usaha konstruksi sebesar 11,29 %. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masih di bawah 10 persen seperti terlihat pada tabel di atas. Sedangkan lapangan usaha yang paling rendah kontribusinya yaitu lapangan usaha jasa perusahaan 0,15%, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang sebesar 0,39 % dan sebesar 1,18 % untuk lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota Sawahlunto sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Sawahlunto (Juta)

URAIAN	Tahun	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat
PDRB Perkapita	2015	45,11	34,41
	2016	48,34	37,20
	2017	51,55	40,19
	2018	55,81	42,84
	2019	58.88	45,68

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto, 2020

Berdasarkan perhitungan atas dasar harga berlaku (tahun dasar 2010) PDRB per kapita penduduk Kota Sawahlunto dalam setiap

tahunnya terus mengalami peningkatan, dari sebesar 45,11 juta rupiah,- pada tahun 2015 menjadi 58,88,- rupiah pada tahun 2019.

PDRB Perkapita Kota Sawahlunto Tahun 2019 adalah sebesar 58,88 juta rupiah,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 45,68 juta rupiah,- pada tahun 2019. Angka ini menjadi indikator bahwa penduduk Kota Sawahlunto secara rata-rata relatif lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil daerah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitupun sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto apabila dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat, maka dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. Pada tahun 2019 Kota Sawahlunto sebesar 5,34 % dan Sumatera barat berada dibawah kota Sawahlunto yaitu 5,05 %.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 (%)

URAIAN	Tahun	Kota Sawahlunto	Provinsi Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi	2015	6,03	5,33
	2016	5,73	5,27
	2017	5,74	5,29
	2018	5,52	5,14
	2019	5,34	5,05

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto, 2020

2.1.5 Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan disuatu wilayah sangat mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. Makin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah akan semakin menambah beban sosial pemerintah. Berbagai upaya dan kebijakan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah.

Tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 adalah 2,17 % menurun dibandingkan tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 2,39% (angka resmi BPS).

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	p1 (kedalaman)	p2 (keparahan)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (Rp.)
2015	2,22	0,18	0,03	1,34	293,725
2016	2,21	0,12	0,01	1,34	318,271
2017	2,01	0,29	0,07	1,23	337,682
2018	2,39	0,27	0,07	1,48	354,665
2019	2,17	0,23	0,05	1,35	374,615

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto, 2020

2.2 Perkiraan Ekonomi Makro Tahun 2020

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Dengan adanya pandemi Covid 19 ini diperkirakan melambatnya PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020 dengan Jumlah Rp. 3.805.120,05 juta rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,62 %.

Juga dapat diperkirakan kontribusi masing-masing lapangan usaha ekonomi/lapangan usaha, dengan kontribusi terbesar diperkirakan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, , lapangan usaha Industri Pengolahan dan kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

2.2.2 Struktur Perekonomian Daerah

Dapat diperkirakan struktur perekonomian daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 akan mengalami perubahan, karena adanya COVID 19. Kontribusi terbesar dalam pertumbuhan perekonomian Sawahlunto akan tetap diberikan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan Industri pengolahan. Diperkirakan konstruksi akan mengalami penurunan karena adanya pengurangan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan dialihkan pada biaya penanganan COVID 19 ini. Selain itu meningkatnya lapangan usaha informasi dan komunikasi dikarenaenakan adanya social distancing, yang menyebabkan beberapa bulan masyarakat harus berada dirumah sehingga meningkat kebutuhan akan informasi dan komunikasi.

Tabel 2.5
Perkiraan Distribusi PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Lapangan Usaha	Kota Sawahlunto	
		PDRB	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	346.897,28	9,1
2	Pertambangan dan Penggalian	206.613,54	5,42
3	Industri Pengolahan	405.984,18	10,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	77.003,57	2,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.010,64	0,42
6	Konstruksi	389.211,12	10,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor	610.691,69	16,02
8	Transportasi dan Pergudangan	297.340,52	7,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80.053,22	2,1
10	Informasi dan Komunikasi	338.891,96	8,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	122.367,06	3,21
12	Real Estate	62.898,96	1,65
13	Jasa Perusahaan	4.955,68	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	459.734,19	12,06
15	Jasa Pendidikan	115.505,36	3,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.363,49	1,19
17	Jasa Lainnya	232.535,54	6,1
	Jumlah	3.812.058,00	100

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi)

2.2.3 PDRB Perkapita

PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2015 – 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHB sebesar 2.715.005 juta rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 60.186 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 45,11 juta rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 48,34 juta rupiah/jiwa pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga sebesar 58,88 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil *forecast*, nilai **PDRB ADHB per Kapita** Kota Sawahlunto meningkat menjadi **60,39 juta rupiah/jiwa** pada tahun 2020. Meskipun terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Kota Sawahlunto diperkirakan masih dapat tumbuh dan mencapai PDRB ADHB sebesar 3.811.930 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini didorong oleh pembelian paket sembako dari berbagai kalangan untuk diserahkan

kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Sawahlunto. Di samping itu kebijakan *School From Home* dan *Work From Home* diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 ini dengan adanya wabah pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa bulan aktivitas perekonomian terganggu bahkan cenderung berhenti, akibat adanya kebijakan *social distancing* sehingga mobilitas manusia berkurang yang berdampak pada lumpuhnya perusahaan-perusahaan, perdagangan dan jasa, serta lapangan usaha-lapangan usaha ekonomi lainnya, yang menyebabkan **pertumbuhan ekonomi** Kota Sawahlunto diperkirakan melambat mencapai **2,62 persen**.

Tabel 2.6
Capaian Makro Ekonomi Tahun 2019, Estimasi Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020 dan Estimasi 2021

No.	Uraian	Capaian Tahun 2019	Perkiraan Tahun 2020 (dalam Juta)	Perkiraan Tahun 2021 (dalam Juta)
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB tahun dasar 2010	3.681.649,00	3.812.058,00	4.022.661
2.	Struktur Perekonomian Daerah			
-	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,84	9,1	9,2
-	Pertambangan dan Penggalian	5,4	5,42	5,43
-	Industri Pengolahan	10,66	10,65	10,02
-	Pengadaan Listrik dan Gas	1,96	2,02	2,12
-	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan, Limbah dan Daur Ulang	0,39	0,42	0,45
-	Konstruksi	11,29	10,21	10,24
-	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,05	16,02	16,04
-	Transportasi dan Pergudangan	8,89	7,8	8,01
-	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2,1	2,1
-	Informasi dan Komunikasi	7,47	8,89	8,89
-	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,29	3,21	3,17

No.	Uraian	Capaian Tahun 2019	Perkiraan Tahun 2020 (dalam Juta)	Perkiraan Tahun 2021 (dalam Juta)
-	Real Estate	1,76	1,65	1,67
-	Jasa Perusahaan	0,15	0,13	0,14
-	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,07	12,06	12,07
-	Jasa Pendidikan	3,28	3,03	3,05
-	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,19	1,2
-	Jasa lainnya	6,09	6,1	6,2
3.	PDRB per kapita (juta rupiah/tahun)	58,8	60,39	63,39
4.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto (%)	5,34	2,62	5,00
5.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat (%)	5,05	1,43	4,30

Sumber Data: Data Olahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto

2.2.4 Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan disuatu wilayah sangat mempengaruhi perekonomian di wilayah tersebut. Makin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah akan semakin menambah beban sosial pemerintah. Berbagai upaya dan kebijakan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah.

Angka tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto paling rendah bila kita bandingkan dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2019 capaian realisasi angka kemiskinan di Kota Sawahlunto sebesar 2,17% jauh dibawah Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,40 %. Namun dengan adanya wabah pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 ini, maka **tingkat kemiskinan** Kota Sawahlunto pada **tahun 2020 diproyeksi meningkat menjadi sebesar 2,45 persen**, dikarenakan kebijakan *social distancing* menyebabkan masyarakat dibatasi untuk keluar rumah, sehingga masyarakat yang bekerja di lapangan usaha informal tidak bisa bekerja secara normal, akibatnya pendapatan mereka menurun dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (menjadi miskin).

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD 2021

3.1 Asumsi Dasar Dalam APBD

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan usaha-lapangan usaha lapangan usaha, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Sawahlunto tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Sawahlunto yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Penyusunan rancangan APBD tahun 2021 disusun atas perkiraan asumsi berbagai indikator ekonomi makro dan rencana penerimaan daerah dan tidak terlepas dari asumsi yang digunakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah. Penetapan asumsi ini didasarkan pada analisis kekuatan ekonomi, keberhasilan berbagai program kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, trend perkembangan ekonomi nasional dan regional.

3.2 Laju Inflasi

Perkiraan inflasi kota Sawahlunto yang diasumsikan sebesar angka inflasi propinsi Sumatera Barat pada umumnya. Namun angka ini sangat dipengaruhi fluktuasi berbagai harga terutama kebutuhan pokok, kebijakan pemerintah pusat dan faktor-faktor lain yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Perkiraan ini ditujukan agar lapangan usaha riil yang merupakan lapangan usaha penggerak pembangunan mampu berjalan normal misalnya harga bahan baku tidak bergejolak sehingga aktivitas ekonomi akan berjalan lancar. Membaiknya aktivitas ekonomi tentunya berimbas pertumbuhan ekonomi daerah.

3.3 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sawahlunto tahun dasar 2010 untuk tahun 2021 diperkirakan akan mencapai Rp. 3.995.376,16 (dalam jutaan) dan kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp. 3.805.120,05 (dalam jutaan). Peningkatan ini disebabkan dengan meningkatnya kontribusi lapangan usaha pembentuk PDRB, dengan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi dan lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk lapangan Usaha lainnya tetap diharapkan peningkatan kontribusinya pada pembentukan PDRB Kota Sawahlunto.

Tabel 3.1
Distribusi Perkiraan PDRB Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Kota Sawahlunto	
		PDRB	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	368.244,81	9,2
2	Pertambangan dan Penggalian	217.344,49	5,43
3	Industri Pengolahan	401.066,63	10,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	84.856,41	2,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan, Limbah dan Daur Ulang	18.011,97	0,45
6	Konstruksi	409.872,49	10,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	642.026,82	16,04
8	Transportasi dan Pergudangan	320.613,15	8,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84.055,88	2,1
10	Informasi dan Komunikasi	355.836,56	8,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	126.884,35	3,17
12	Real Estate	66.844,44	1,67
13	Jasa Perusahaan	5.603,73	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	483.121,18	12,07
15	Jasa Pendidikan	122.081,16	3,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48.031,93	1,2
17	Jasa lainnya	248.164,98	6,2
	JUMLAH	4.002.661,00	100

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto (angka proyeksi), 2020

3.4 Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2021, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2021-2022 diproyeksikan sebagai berikut.

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi	
		2021	2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,00	5,17
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,88	6,40
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,40	2,35
4	Gini rasio	0,3	0,29
5	IPM	73,31	73,77
6	Tingkat Inflasi (%)	2,23	2,29
7	PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa)	63,39	66,73

3.5 PDRB Perkapita

Dengan adanya Covid 19 pada tahun 2020 yang berimbas pada perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto. Maka pada tahun 2021 ini merupakan masa pemulihan ekonomi, maka PDRB per kapita penduduk kota Sawahlunto diperkirakan akan mencapai Rp.63.390.000,-. meningkat dibandingkan PDRB Perkapita tahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp.60,390.000,-.

3.6 Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2019 adalah penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2017 yang proses pendataan yang melibatkan unsur

pemerintah terdepan dan unsur masyarakat. Sehingga diharapkan semua stakeholders penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama - sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati ditingkat kota.

Menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan.

Pada tahun 2021 ini diperkirakan tingkat kemiskinan menurun dibandingkan dari perkiraan tahun 2021 dari 2,45% menjadi 2,40 %. Diharapkan dengan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan yang telah diberikan oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto.

3.7 Lain-lain Asumsi

Kondisi lain yang cukup mempengaruhi terhadap RAPBD tahun 2021 meliputi asumsi kenaikan gaji dan pembayaran tunjangan PNS sudah menjadi kebijakan pemerintah. Rencana penambahan pegawai melalui pengangkatan CPNS kategori 2/ PPPK dan formasi 2020 yang akan menyebabkan peningkatan alokasi belanja pegawai. Serta penyesuaian kewenangan Pemerintah Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Sawahlunto, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber pendapatan daerah Kota Sawahlunto bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2021 di perkirakan berjumlah Rp. 658.964.616.936,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 awal tidak mengalami perubahan yang cukup besar, namun kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 yang diambil di triwulan II tahun berjalan berpengaruh cukup besar terhadap proporsi anggaran pada OPD secara keseluruhan.

Adapun sumber pendapatan dihitung berdasarkan jenisnya diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rencana penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp.58.871.040.600,- dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2020 pendapatan asli daerah sebesar Rp 61.765.678.778,- turun sebesar Rp 2.894.638.178,- atau sekitar 4,92%.
- b. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp. 592.962.576.336,- dengan asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat sebesar Rp.567.797.568.000 dan Pendapatan Transfer antar daerah sebesar Rp.25.165.008.336,-.

- c. Pada lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2021 diperkirakan berjumlah Rp. 7.131.000.000,-

Mencermati komposisi penerimaan daerah Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun, kontribusi dari PAD masih sangat kecil sekitar 8,93% dibandingkan dengan Dana Perimbangan sebesar 77,2%, baik Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi. Sehingga diperkirakan pada masa mendatang peran Dana Perimbangan tetap menjadi yang dominan dalam komposisi pendapatan daerah karena memang potensi PAD di Kota Sawahlunto sangatlah terbatas. Pemerintah perlu menetapkan strategi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah yang akan dijelaskan pada subbab Upaya pencapaian target pendapatan daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp.658.964.616.936,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan relatif kecil sekitar Rp. 27.105.361.822,- atau sekitar 4,11%. Secara umum komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2020 dan Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Komponen	APBD 2020 (Rp.)	RENCANA 2021 (Rp.)	Tambah/ Kurang (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	61.765.678.778,-	58.871.040.600,-	-4,92
2	Dana perimbangan/ Pendapatan Transfer	508.874.543.000,-	592.962.576.336,-	14,18
3	Lain-lain pendapatan yang sah	61.219.033.336,-	7.131.000.000,-	-88,3
	Jumlah	631.859.255.114,-	658.964.616.936,-	4,11

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 2.894.638.178,- sekitar 4,94 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana perimbangan yang pada tahun 2020 berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan berdasarkan postur baru yang termasuk ke dalam pendapatan transfer adalah Transfer dari Pendapatan Pusat dan Transfer antar Daerah. Untuk tahun 2021 diasumsikan mengalami perubahan dari APBD 2020 menjadi Rp. 592.962.576.336,-. Perubahan yang cukup signifikan adalah dikarenakan Dana Alokasi Desa yang semula masuk ke dalam kategori Lain-lain pendapatan yang sah, berdasarkan Permendagri 62 tahun 2020 dikelompokkan ke dalam Pendapatan Transfer.

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2021 diperkirakan Rp. 7.131.000.000,-. Besaran tersebut diasumsikan Dana Hibah.

Secara keseluruhan target pendapatan daerah tahun 2021 dapat dirinci pada tabel berikut ini :

TABEL 4.2
TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	URAIAN	TARGET TAHUN 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	58.871.040.600,00
4,1,1	Pajak Daerah	6.091.130.030,00
4.1,2	Retribusi Daerah	5.099.130.030,00
4.1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	11.770.000.000,00
4.1,4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.910.410.570,00
4.2	Pendapatn Transfer	592.962.576.336,00
4.2,1	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	567.797.568.000,00
4.2,2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.131.000.000,00
4.3,1	Hibah	7.131.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	658.964.616.936,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid-19, alokasi belanja daerah tahun 2021 direncanakan untuk prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kota Sawahlunto dengan pengoptimalan anggaran belanja daerah terhadap program dan kegiatan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang. Dalam penyusunan anggaran 2021 harus berpedoman pada prinsip yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Urusan Wajib masih diprioritaskan dalam proporsi belanja untuk tahun 2021 yang meliputi:

- Pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- jaminan sosial.

Urusan pilihan mendapat porsi yang cukup besar karena menjadi fokus dalam pemulihan ekonomi meliputi:

- pariwisata;

- pertanian;
- perdagangan; dan
- perindustrian.

Selanjutnya juga terdapat urusan pendukung, penunjang, pengawasan dan kewilayahan. Urusan ini pada APBD dijabarkan ke dalam Belanja Langsung, yaitu belanja yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.

Terkait dengan pencapaian RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, alokasi belanja ditekankan pada:

1. Sasaran dan program prioritas pembangunan tahun ke-3 yang tercantum pada RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023;
2. Program dan kegiatan yang mengedepankan pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19;
3. Pendampingan terhadap program-program yang didanai oleh pemerintah pusat;
4. Program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrembang; dan
5. Mengakomodasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

5.2 Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Kebijakan terhadap belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga untuk tahun 2021 menyesuaikan komposisi sesuai dengan postur APBD yang dicantumkan dalam Permendagri 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai masih memiliki proporsi yang besar dalam struktur pembiayaan. Untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.272.075.603.512,-.

Adapun Penganggaran belanja pegawai meliputi :

1. Penyediaan anggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyediaan anggaran untuk pemberian gaji bulan ketiga belas dan gaji keempat belas bagi PNSD.
3. Penyediaan anggaran memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD.
4. Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai maka diperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
5. Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibatasi dengan mempertimbangkan atau efesiensi, kepatutan, kewajaran beban kerja serta pemerataan penerimaan penghasilan dengan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. Besaran pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dalam hal ini Keputusan Walikota Sawahlunto.
6. Penyediaan Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.

7. Penyediaan Anggaran untuk Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Penyediaan anggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja .
 - e. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
9. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
10. Penganggaran Tunjangan Profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Komponen belanja barang/jasa merupakan komponen belanja yang cukup dominan dalam APBD, komponen ini dirinci dalam penjabaran APBD dimulai dari Belanja Bahan Pakai habis dan objek-objek lainnya yang diuraikan dalam numenklatur belanja dan kodifikasi.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 mempunyai kewajiban untuk membayar bunga utang atas pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011 untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah,-). Belanja bunga tersebut untuk tahun 2021 masih .dianggarkan pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

Tagihan kewajiban atas bunga utang terdiri dari Bunga dan Jasa bank, yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu jatuh tempo pada setiap tanggal 15 Mei dan tanggal 15 November pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan.

Estimasi dalam Tahun Anggaran 2021, kewajiban bunga utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011, Pemerintah menetapkan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Bank penatausahaan atas pinjaman dimaksud dan pembayaran bunga utang disetor ke Rekening Menteri Keuangan, Rekening Pembangunan Daerah dalam rupiah dengan Nomor : 519.000102980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah untuk tahun 2021 diperkirakan senilai Rp.10.895,348,623,- yang dianggarkan tersebar pada OPD teknis. Mekanisme dan ketentuan mengenai pemberian hibah tetap mengacu kepada aturan yang berlaku:

1. Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
3. Terkait belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia akan mempedomani :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dimana penganggaran belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada anggaran PPKD sedangkan Anggaran belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
 5. Pemberian Hibah diberikan secara selektif, akuntabel dan transparansi dan berkeadilan sesuai kemampuan daerah.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial untuk tahun 2021 diperkirakan senilai Rp.2.916.950.000,- yang dianggarkan pada OPD teknis yang terkait. Mekanisme dan ketentuan mengenai pemberian hibah tetap mengacu kepada aturan yang berlaku:

1. Sesuai dengan Pasal Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Mepedomani Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Bantuan Sosial diberikan kepada:
 - a. Individu/Keluarga yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - b. Lembaga non Pemerintah yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Kriteria sesuai tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial.
 - b. Perlindungan Sosial.
 - c. Jaminan Sosial.

- d. Pemberdayaan Sosial.
- e. Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Penanggulangan Bencana.

f. Belanja Modal

Belanja Modal lebih dirinci dengan mengelompokkan ke dalam:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.27.945.267.434,-
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp.40840.296.185,-
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp. 67.411.798.405
- d. belanja Modal Aset tetap lainnya senilai Rp.593.105.494,-

g. Belanja Tidak terduga

Kebijakan penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 masih dialokasikan pada Belanja Tak Terduga dengan besar Rp.4.500.000.000,-. Besar anggaran ini mempedomani besaran dana *recofussing* anggaran tahun 2020 untuk penanggulangan Covid-19 yang diprediksi masih akan dihadapi pada tahun 2021.

h. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ dan Pemerintah Desa.

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/ dan pemerintah desa tahun 2021 diperkirakan senilai Rp.1.256.717.000,- yang dialokasikan sebagai sumber pendanaan APBDes 2021 dan dianggarkan di PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sesuai Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah desa atau Pendapatan

Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

2. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota Sawahlunto akan mengalokasikan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
3. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota kepada Desa paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kota.
4. Sesuai dengan pasal 97 ayat (2), menyebutkan bahwa Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Memperhatikan bahwa realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa tidak cukup signifikan, maka yang akan dijadikan acuan dasar perhitungan pembagian secara proposional adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

5. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penetapan

Pengalokasian Bagian bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

7. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksud akan menjadi pagu indikatif Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

i. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan bagi pemerintah desa tahun 2021 diberikan sebagai Alokasi Dana Desa yang akan dituangkan ke dalam APBDes Tahun 2021 dengan nilai Rp.69.764.148.000,- mengikuti dasar ketentuan sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan desa adat yang diterima dari APBN.
3. Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota dalam APBD Tahun berjalan setelah dikurangi DAK.
4. Sesuai Pasal 72 ayat 6, ditegaskan bahwa Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Pusat dapat melakukan Penundaan dan /atau Pemetongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke Desa.
5. Sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
6. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan.
7. Alokasi Dana Desa yang telah disepakati KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya akan ditetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penetapan Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Alokasi Dana Desa dimaksud akan menjadi pagu indikatif Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAERAH

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan tahun 2021 ternyata belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan pendapatan sehingga mengakibatkan perbedaan yang relatif besar antara rencana pendapatan dengan rencana belanja, dalam hal ini rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan sehingga memicu terjadinya potensi defisit anggaran.

Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan tetap dapat terlaksana dengan baik maka defisit anggaran ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah sehingga diperkirakan seluruh kebutuhan rencana belanja dapat terpenuhi.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp.67.872.774.008,66 yang berasal dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.12.695.889.035,- dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.55.176.884.973,31.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM sebesar Rp. 500.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp.1.166.666.666,66 sehingga total pengeluaran pembiayaan diestimasi sebesar Rp.1.666.666.666,66.

Besar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diasumsikan dapat menutupi defisit anggaran yang dikalkulasikan sebesar Rp.66.206.107.342,- yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi dengan belanja daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Target Pendapatan

Target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Seyogyanya target tersebut dapat dicapai lebih dari standar minimal. Namun apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kekurangan penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

1. Melakukan upaya-upaya instensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Melakukan upaya penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, penurunan angka kemiskinan, SAKIP dan indikator lainnya;

7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana bantuan (hibah) dari pemerintahan pusat.

7.2 Strategi Pengalokasi Belanja

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, tahun 2021 kebijakan umum pembangunan daerah difokuskan kepada pemulihan ekonomi (*Recovery economy*) sebagai dampak pandemi Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung selama 3 tahap selama kurun waktu Maret s.d Juni 2020 berpengaruh kepada menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada sektor-sektor riil yang terdampak langsung pada masyarakat. Disamping itu program-program strategis tetap mengacu kepada pencapaian target RPJMD Tahun ke-3 yang telah ditetapkan.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa tambahan alokasi bantuan modal kepada UMKM melalui Dana Bergulir. Sektor pariwisata yang mengalami dampak cukup besar akibat pandemi, tahun 2021 dirangsang dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu *multiplier effect* bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan dengan memberikan stimulus bagi kelompok tani dengan bantuan pupuk dan bibit. Sektor perkebunan juga mendapat porsi dalam prioritas pembangunan meskipun secara umum pertanian/perkebunan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam memprioritaskan program/kegiatan yang menjadi daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat serta selaras dengan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun 2021 mengedepankan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto yang terdampak akibat kondisi keuangan dan Pandemi Covid-19 yang terjadi semenjak awal tahun 2020. Target RAPBD 2021 disusun dengan skenario positif dengan asumsi penganggaran sumber-sumber pendapatan dengan alokasi belanja dan pembiayaan yang relatif dapat dicapai.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Sawahlunto, 14 Agustus 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO

ttd

DERI ASTA, SH.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : $\frac{180.342/06/Huk-Ham/2020}{188/05/DPRD-Swl/2020}$

Tanggal : 14 Agustus 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DERI ASTA, SH**
Jabatan : Walikota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Sawahlunto

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto

2. a. Nama : **EKA WAHYU, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto
- b. Nama : **H. JASWANDI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto
- c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sawahlunto, 14 Agustus 2020

**WALIKOTA
SAWAHLUNTO**

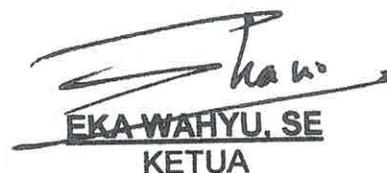
Selaku,
PIHAK PERTAMA



DERI ASTA, SH

**PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK KEDUA



**EKA WAHYU, SE
KETUA**

**H. JASWANDI, SE
WAKIL KETUA**



**ELFIA RITA DEWI, SH
WAKIL KETUA**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342/ 06 /Huk-Ham/2020
188/ 05 /DPRD-Swl/2020

Tanggal : 14 Agustus 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DERI ASTA, SH**
Jabatan : Walikota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Sawahlunto

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto

2. a. Nama : **EKA WAHYU, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

b. Nama : **H. JASWANDI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sawahlunto, 14 Agustus 2020

**WALIKOTA
SAWAHLUNTO**

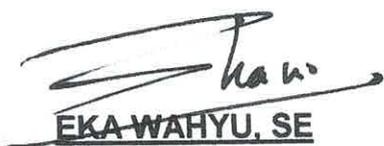
Selaku,
PIHAK PERTAMA



DERI ASTA, SH

**PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK KEDUA



EKA WAHYU, SE
KETUA



H. JASWANDI, SE
WAKIL KETUA



ELFIA RITA DEWI, SH
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342/ 07 /Huk-Ham/2020
188/ 06 /DPRD-Swl/2020

Tanggal : 14 Agustus 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DERI ASTA, SH**
Jabatan : Walikota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Sawahlunto
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto

2. a. Nama : **EKA WAHYU, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

- b. Nama : **H. JASWANDI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

- c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Sawahlunto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Sawahlunto, 14 Agustus 2020

**WALIKOTA
SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK PERTAMA



DERI ASTA, SH

**PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK KEDUA



EKA WAHYU, SE
KETUA



H. JASWANDI, SE
WAKIL KETUA



ELFIA RITA DEWI, SH
WAKIL KETUA

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	32.245.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	348.686.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10.275.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	45.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	94.000.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	122.719.900
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.420.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	338.000.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	89.798.233
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	110.622.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	162.632.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	511.287.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	45.650.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	487.460.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.659.082.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.739.166.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	495.334.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	186.294.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	582.646.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.024.332.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	189.264.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	169.562.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	253.700.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.400.541.500
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	457.158.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	107.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATAN BARANGIN	29.080.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	117.175.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATAN BARANGIN	30.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	366.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN SILUNGKANG	110.150.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN TALAWI	97.175.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.232.055.923
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.910.925.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.526.434.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.990.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.737.900.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.745.810.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.306.575.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	818.025.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	307.125.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.220.698.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.890.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	83.860.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400.007.240
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	523.979.460
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	101.557.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	122.210.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	21.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	117.275.000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	90.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		SEKRETARIAT DAERAH	75.499.950
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	27.063.313.720
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	6.253.025.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	17.285.289.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	39.231.206.300
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	165.870.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	185.250.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	583.490.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	925.470.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	888.454.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.304.970.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.422.672.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.038.576.900
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	981.410.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	815.710.800
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	46.175.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	859.100.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	307.925.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	47.940.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.595.722.000
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.468.369.232
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.003.275.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	490.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	874.508.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	617.925.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	140.635.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1.589.682.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	2.024.180.250

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.457.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.407.235.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	144.925.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.109.203.056
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PENDIDIKAN	100.702.834.181
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	57.058.976.863
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.295.423.367
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.303.804.302
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	848.475.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.507.931.285
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	272.500.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	602.500.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.837.500.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.659.700.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	912.950.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	913.899.060
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.111.341.531
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	6.748.376.752
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12.311.904.141

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	80.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	72.551.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.586.975.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	128.775.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.348.483
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.830.894.200
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.678.742.862
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	349.057.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	239.950.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	118.960.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.302.218.603
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	93.475.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.788.635.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	280.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERHUBUNGAN	3.668.606.233

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		DINAS PERHUBUNGAN	5.158.147.390
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		DINAS PERHUBUNGAN	200.000.000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		SEKRETARIAT DAERAH	559.869.500
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		SEKRETARIAT DAERAH	2.043.855.000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		SEKRETARIAT DPRD	377.940.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.872.803.631
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.640.148.425
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		SEKRETARIAT DAERAH	63.545.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	4.538.581.166
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.016.651.596
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	481.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	114.825.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SEKRETARIAT DAERAH	22.889.846.028
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	8.480.353.475
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	803.269.875
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SEKRETARIAT DPRD	15.856.216.293
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	11.485.861.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.494.361.194
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.163.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.152.825.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.295.959.490
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	79.126.484.150
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	594.616.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.002.381.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.178.044.415
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.237.486.027
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	345.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN BARANGIN	4.761.388.909
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN LEMBAH SEGAR	6.273.977.957
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN SILUNGKANG	2.394.203.101
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATAN TALAWI	2.496.431.392
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.655.338.570
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	906.258.352
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.604.449.802
7	Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.754.572.513
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.446.940.198
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	642.106.500
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	199.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	654.149.890
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	454.500.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN BARANGIN	33.100.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN BARANGIN	18.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	326.295.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN BARANGIN	16.710.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN BARANGIN	25.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN BARANGIN	865.860.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN SILUNGKANG	292.755.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN SILUNGKANG	8.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATAN SILUNGKANG	35.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN SILUNGKANG	22.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN TALAWI	539.987.500

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN TALAWI	59.148.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATAN TALAWI	25.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN TALAWI	85.548.975
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	311.112.450

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpagu Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pelestarian serta Aplikasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	642,106,500
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	83,860,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	874,508,500
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	617,925,000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	140,635,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1,589,682,500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	2,024,180,250
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	4,538,581,166
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,163,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Barangin	454,500,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Barangin Kelurahan Durian 1	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Barangin Kelurahan Durian	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Barangin Kelurahan Lubang Panjang	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Barangin Kelurahan Saringan	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar	326,295,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Air Dingin	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Aur Mulyo	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	865,860,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Pasar	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Lembah Segar Kelurahan Tanah Lapang	865,860,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Silungkang	292,755,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN Talawi	539,987,500
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN BARANGIN	18,500,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN LEMBAH SEGAR	25,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN Silungkang	22,500,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN Talawi	85,548,975
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	311,112,450
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1,446,940,198
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	349,057,000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	239,950,000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	118,960,000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		SEKRETARIAT DAERAH	559,869,500
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		SEKRETARIAT DAERAH	2,043,855,000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		SEKRETARIAT DPRD	377,940,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		SEKRETARIAT DAERAH	75,499,950
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		SEKRETARIAT DAERAH	63,545,000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	11,485,861,400
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	481,000,000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	114,825,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70,000,000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,152,825,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT	654,149,890
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT	345,500,000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	199,000,000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,302,218,603
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	79,126,484,150
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	594,616,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,002,381,600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,678,742,862
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SEKRETARIAT DAERAH	22,889,846,028
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,016,651,596
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SEKRETARIAT DPRD	15,856,216,293
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,494,361,194
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INSPEKTORAT	5,237,486,027
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATANAMATAN BARANGIN	4,761,388,909
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATANAMATAN LEMBAH SEGAR	6,273,977,957
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATANAMATAN SILUNGKANG	2,394,203,101
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KECAMATANAMATAN TALAWI	2,496,431,392
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,295,959,490
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATANAMATAN BARANGIN	33,100,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATANAMATAN BARANGIN	29,080,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATANAMATAN LEMBAH SEGAR	16,710,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATANAMATAN LEMBAH SEGAR	30,000,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATANAMATAN SILUNGKANG	8,500,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATANAMATAN SILUNGKANG	35,000,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATANAMATAN TALAWI	59,148,500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATANAMATAN TALAWI	25,000,000
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	27,063,313,720
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	6,253,025,000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,348,483
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,595,722,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PENDIDIKAN	100,702,834,181
4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 4 yaitu Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	17,285,289,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN	39,231,206,300
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINAS KESEHATAN	165,870,000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		DINAS KESEHATAN	185,250,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN	583,490,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD INSTALASI FARMASI KOTA	925,470,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS KOLOK	888,454,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	1,304,970,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG	1,422,672,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS TALAWI	2,038,576,900
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	981,410,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN / UPTD PUSKESMAS LUNTO	815,710,800
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DINAS KESEHATAN	93,475,000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DINAS KESEHATAN	1,788,635,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DINAS KESEHATAN	280,500,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	57,058,976,863
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KESEHATAN	28,295,423,367
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,178,044,415
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50,000,000
5	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	32,245,000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	348,686,000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10,275,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	45,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3,659,082,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3,739,166,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	495,334,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	186,294,000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	582,646,000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	117,275,000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	200,000,000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	90,000,000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12,311,904,141
6	Pengembangan Pariwisata Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi. Prioritas ini ada 2 Gerakan Terpadu yaitu Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan KECAMATANil dan Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisataaan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	94,000,000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	122,719,900
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145,420,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECAMATANIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	338,000,500
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	89,798,233

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9,457,000,000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,407,235,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	144,925,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,109,203,056
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,024,332,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	189,264,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310,000,000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	169,562,000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	253,700,000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,400,541,500
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	457,158,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	110,622,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	162,632,000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	511,287,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	45,650,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,468,369,232
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,003,275,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	490,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS KOPERASI, USAHA KECAMATANIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,872,803,631
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4,640,148,425
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	487,460,000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50,000,000
8	Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	307,125,000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,220,698,500
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33,890,000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	46,175,000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	859,100,000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	307,925,000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	47,940,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400,007,240
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	523,979,460
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	101,557,500
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	122,210,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN TALAWI	97,175,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN SILUNGKANG	110,150,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR	117,175,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL AIR DINGIN	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL AUR MULYO	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL KUBANG SIRAKUK UTARA	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL KUBANG SIRAKUK SELATAN	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL PASAR	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN LEMBAH SEGAR / KEL TANAH LAPANG	366,000,000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	8,480,353,475
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN	107,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN / KELURAHAN DURIAN 1	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN / KELURAHAN DURIAN 2	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN / KELURAHAN LUBANG PANJANG	366,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN BARANGIN / KELURAHAN SARINGAN	366,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,111,341,531
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	6,748,376,752
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6,910,925,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,376,757,500
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,526,434,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,990,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7,737,900,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9,745,810,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37,306,575,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	818,025,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	272,500,000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	602,500,000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1,837,500,000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5,659,700,000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	803,269,875
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / UPTD RUSUNAWA	912,950,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5,158,147,390
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200,000,000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13,303,804,302
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG / UPTD ALAT BERAT	848,475,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERHUBUNGAN	3,668,606,233
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Prioritas ini memiliki Gerakan Terpadu yang sama dengan Prioritas 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbang Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	80,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	72,551,000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	906,258,352
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4,830,894,200
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP / UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	400,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14,604,449,802
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1,586,975,000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	128,775,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8,507,931,285
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6,754,572,513
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	913,899,060
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,655,338,570

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD	Jumlah
				Pelaksana	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,232,055,923

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					
		Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto					
		Meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	4,538,581,166	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

					DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	874,508,500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					

					DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	617,925,000	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					

					DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	140,635,000	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

					DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	1,589,682,500	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					

Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							
							1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bendera/ umbul-umbul papan data/ spanduk yang	12 bulan		Kota Sawahlunto
							Penyusunan DPA	1 dokumen			
							pembayaran jasa	2 Orang			
							Operasi sisir pendataan pendidikan	1 dokumen			
							Jumlah dokumen renja yang dibagikan	1 dokumen			
							jumlah dokumen dibagikan	3 dokumen			
				1.01.01.2.02 Administrasi							
							1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah penatausaha keuangan dan barang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							pembayaran jasa	6 Orang			
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan	75 orang	Semua Kabupaten/Kota	
							Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Diadakan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Listrik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rakorkon yang diikuti	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	4 Unit	Kota Sawahlunto	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menuntut	Jumlah jasa surat menuntut yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Luas mushollah SDN 01 Talawi Mudik	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Rehab kantin,UKS,WC	1 Paket		
								Pembangunan Kantor SD IT TAHFIZUL Quran	1 Unit		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	Pemasangan pagar SD N 01 Talawi Mudik	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Jumlah pagar, gerbang	1 Paket		
								jumlah folding gate dan tralis di SDN 01 Talawi	1 unit		
								Jumlah DAM SDN 29	1 Paket		
								Lanjutan pemasangan Paving blok SDN 09	1 Unit		
								luas pagar dan gerbang	1 Unit		
								Pagar dan paving blok	1 Unit		
								Panjang dam dan pagar	1 Unit		
								Panjang dam dan pagar	1 Unit		
								Panjang pagar dan gerbang SDN 11	1 Unit		
								Panjang pagar SD IT	1 Unit		
								Panjang pagar SDN 09	1 Unit		
								Panjang pagar SDN 13	1 Unit		
								Pemasangan Paving	1 Unit		
								Pembuatan DAM belakang SDN 06	1 Unit		
								Pembuatan Pagar SDN	1 Unit		
								pengedaman dan saluran air SDN 16	1 Unit		
							1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Luas rumah dinas SDN 05 Kusiba	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel	Jumlah lemari kelas SD	50 Buah	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah kursi meja SD	272 Unit		
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan	Jumlah sarana	500 Orang	Kota	
							Perencanaan Siswa	Jumlah SD yang sarana	12 Sekolah	Sawahlunto	
								dan prasarananya			
								Program Indonesia	1 Paket		
								Pintar Kota			
							1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin	Jumlah bulan untuk	12 bulan	Kota	
							Bangunan Gedung dan Ruangan	pemeliharaan gedung		Sawahlunto	
								pembayaran jasa	11 Orang		
								Jumlah bulan untuk	12 bulan		
								pemeliharaan peralatan			
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya	Kegiatan Penunjang	12 Bulan		
							Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Unit Layanan 4			
								jumlah pegawai yang			
								dibayarkan jasa			
								Jumlah SD Negeri se	55 Sekolah		
								Kota Sawahlunto yang			
								BOS SD	62 sekolah		
								BOSDA TK	2 sekolah		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan	Jumlah sekolah yang	62 Sekolah	Kota	
							Proses Belajar dan Ujian bagi	akan dimonitoring		Sawahlunto	
								Jumlah sekolah yang	60 Sekolah		
								mengikuti ujian standar			
								Jumlah Sekolah yang	59 Sekolah		
								Melalui US			
								Pembayaran Jasa	1 Orang		
								Jumlah sekolah yang	62 Sekolah		
								dimonitoring			
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat,	pembayaran jasa	2 Orang	Kota	
							Rakat dan Kreativitas Siswa			Sawahlunto	
								jumlah siswa yang	381 Orang		
								mengikuti lomba			
								Pengujian Tahfish Al			
								jumlah siswa yang	50 Orang		
								difasilitasi Pembinaan			
								jumlah peserta yang	20 Orang		
								mengikuti daerah			
								Jumlah club olimpiade	3 Orang		
								yang difasilitasi dan			
								jumlah siswa yang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah cabang kelas KOSN yang mengikuti lomba FLS2N	6 Cabang		
								Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N	44 Sekolah		
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	62 Sekolah	Kota Sawahlunto	
								Jumlah forum guru SD yang difasilitasi	1 Forum		
								Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan	16 orang		
								Jumlah guru tahfidz dan bekal kerja yang dilatih	112 orang		
								Jumlah KKG yang difasilitasi	23 Kelompok		
								Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis	25 Orang		
								Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	4 orang		
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah operator yang dapat mengolah	60 Orang	Kota Sawahlunto	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah							
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Luas ruang kelas SMPN 2 Sawahlunto	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								jumlah CCTV SMP N 2 Sawahlunto	1 Paket		
							1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	Luas asrama putri SMPN 2 Sawahlunto	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lampu penerangan lingkungan asrama/ sekolah SMPN	0 Unit	Kota Sawahlunto	
								pembayaran jasa	1 Orang		
								pembatas ruang kelas SMPN 2 Sawahlunto	1 Unit		
								panjang dam ,pagar samping dan belakang	1 paket		
								Luas bak penampungan air bersih	1 Unit		
								Pengecoran dan dam Lapangan Upacara	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								pembuatan pagar jalan SMPN 4 Sawahlunto	1 paket		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Kursi Meja SMP	171 unit	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMP yang sarana dan prasarannya sesuai	11 Sekolah	Kota Sawahlunto	
								Marching Band SMP N 1 Sawahlunto	1 Paket		
								Drumband SD N 04 Silungkang	1 Paket		
								Jumlah drumband SDN 10 Sertur	1 Paket		
								Marching Band SD IT ISMILAU UMMAH	1 Paket		
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Program Indonesia Pintar Kota	1 Paket	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	70 Sekolah	Kota Sawahlunto	
								BOS SMP	12 bulan		
								Jumlah SMP Negeri se Kota Sawahlunto yang	9 Sekolah		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah sekolah yang dimonitoring	11 Sekolah	Kota Sawahlunto	
								Jumlah sekolah yang mengikuti ujian standar	11 Sekolah		
								Jumlah sekolah yang akan dimonitoring	12 Sekolah		
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pembelajaran berbasis	25 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah forum guru SMP yang difasilitasi	1 Forum		
								Jumlah guru SMP yang mengikuti olimpiade	24 Orang		
								Jumlah guru tahfidz dan berkebutuhan yang dilatih	32 Orang		
								Jumlah kelompok yang difasilitasi MCMN	13 Kelompok		
								Jumlah peserta yang mengikuti magang	4 Orang		
								jumlah sekolah yang mengikuti bimbingan	25 Sekolah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah cabang olahraga KOSN yang	11 Cabang	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran jasa	1 Orang		
								Jumlah club olimpiade yang difasilitasi dan jumlah siswa yang	20 Cabang		
								Jumlah operator yang dapat masalah	11 Orang		
								jumlah peserta yang mengikuti daerah	20 Orang		
								Jumlah sekolah yang mengikuti lomba FLS2N	44 Sekolah		
								Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang beri	450 Orang		
								jumlah siswa yang difasilitasi Pembinaan	50 Orang		
								jumlah siswa yang mengikuti lomba Pengujian Tahfish AI	381 Orang		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia							
							1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Luas PAUD melati desa guguk balang	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Pembangunan PAUD Bertingkat II tahap 1 samping musolah Baiturahmah Talawi	1 Unit		
								Luas PAUD harapan	0 Unit		
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembuatan Tempat Bermain PAUD Violet Dan Posyandu Bunga-Bunga Bangsa Sapan	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Luas PP permata bunda	1 Unit		
								Luas TK an Nur Kayu	1 Unit		
								Luas TK tunas Bangsa	1 Unit		
								Pembangunan TK luak	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pembuatan Pagar dari atas teras PAUD Permata Bunda Pasar	1 Unit		
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	pembinaan PAUD Kasih ibu Mekar sari Desa	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Luas TK Aisyiah Situngkang	1 Unit		
								Rehab ruang kelas TK AL Ikhlas Desa Lunto	1 Unit		
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mobiler PAUD yang diadakan	10 buah	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktis dan Beragam Siswa PAUD	Persentase APE PAUD yang tersedia	33 Paket	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	pembayaran jasa	53 Orang	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	pembayaran jasa	1 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah operator yang mampu mengolah	123 lembaga		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen PAUD	pembayaran jasa	4 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Pendidik Paud yang di Fasilitas	2 Pokja		
								jumlah paud dan di kelas yang	50 lembaga		
								jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi	123 lembaga		
								Jumlah kelompok kerja guru TK yang	4 Kelompok		
								BOP PAUD Negeri	2 Sekolah		
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan							
							1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Panjang Dam yang dibangun	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Luas Aula yang di rehab	1 Unit		
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan	Jumlah peralatan/ media pendidikan dan	1 paket	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah operasional SPMK SKP difasilitasi	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								pembayaran jasa	10 Orang		
								Jumlah kelompok yang difasilitasi	9 Kelompok		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	Jumlah kelompok yang melaksanakan ujian	1 Kelompok	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah kelompok bermain yang difasilitasi	2 Kelompok	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan pembuatan kue kering yang memperoleh	1 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah lembaga yang dibiayai	2 lembaga	Kota Sawahlunto	
								Jumlah kelompok keaksaran fungsional	2 Kelompok		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan							
							1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	jumlah sekolah yang di monitoring	73 sekolah	Kota Sawahlunto	
								jumlah guru ,kepsek dan tenaga kependidikan	12 orang		
								jumlah guru membuat alat peraga	40 orang		
								Jumlah guru PAUD yang memperoleh sertifikat dan	150 Orang		
								Jumlah guru TK yang dilatih	30 Orang		
								jumlah ikatan guru	1 kelompok		
								Jumlah kegiatan tk kota dan provinsi MAN	2 tingkat		
								jumlah kepsek paud yang dilatih	33 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah kepsek yang dilatih jadi sekep	15 orang		
								jumlah peserta jambora	60 orang		
								jumlah guru dan murid	200 orang		
								jumlah TPK yang dilatih dalam 2 kegiatan	200 orang		
								pembayaran jasa	291 Orang		
								jumlah berkas yang dilatih anaka kadik	80 berkas		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.02.01.2.02 Administrasi							
							1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 bulan		
							1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Dibayarkannya honor penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	240 orang	Semua Kabupaten/Kota Kota	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum							
							1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya komponen kelistrikan (bulan)	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sedot WC	10 buah	Semua Kabupaten/Kota	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								iuran retribusi kebersihan	4 triwulan		
								Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan		
								Tersedianya ATK	12 bulan		
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota Kota	
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya surat kabar (jenis)	2 jenis	Kota Sawahlunto	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Tersedianya oksigen (bulan)	12 bulan		
								Tersedianya gas elpigi (bulan)	12 bulan		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah barang yang diadakan (paket)	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Peralatan gedung kantor yang diadakan	1 jenis		
								Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	2 jenis		
								Jumlah mobiler rumah sakit yang diadakan	2 jenis		
								Jumlah barang yang diadakan (paket)	100 persentase		
							1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Terpeliharanya peralatan kantor (unit)	93 unit	Kota Sawahlunto	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menunjang	Tersedianya meterai (lembar)	350 lembar	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								pengiriman yang	12 bulan		
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
							1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota Kota	
								Jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 bulan		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Terpeliharanya kendaraan dinas (unit)	181 unit		
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah sarana kesehatan direhab	1 pustu	Kota Sawahlunto	
								Terpeliharanya rumah dinas (unit)	1 paket		
								Terpeliharanya gedung kantor (paket)	1 paket		
								Jumlah Pustu yang dibangun	1 paket		
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan		
				1.02.01.2.10 Peningkatan							
							1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan operasional	12 bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah							
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	1 puskesmas	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Jumlah sarana prasarana yang	1 jenis	Kota Sawahlunto	
								Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan	2 fasyankes		
								Jumlah prasarana dan pendukung Fasilitas pelayanan kesehatan	1 fasyankes		
								Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	1 jenis		
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan	72 paket	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator	91 persentase	Kota Sawahlunto	
								Jumlah ketersediaan obat dan vaksin	1 paket		
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Obat	Jumlah ketersediaan obat	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator	91 persentase		
							1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan	Jumlah bangunan poliklinik rumah sakit	1 unit	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah sarana rumah sakit yang dipelihara	1 unit		
								Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang	1 unit		
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Instalasi pengolahan limbah rumah sakit	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Instalasi/jaringan rumah sakit yang terpelihara	12 bulan		
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara	24 puskesmas dan pustu	Kota Sawahlunto	
								Alat kesehatan di unit-unit layanan rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan/kalibrasi	1 jenis		
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							
							1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang terdampingi	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat	92 persen	Kota Sawahlunto	
								Komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100 persen		
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	bayi yang dilaksanakan Skrining Hipotiroid	87 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi	95 persen	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Persentase murid yang diperiksa kesehatannya	100 persen	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase anak sekolah yang mendapatkan	95 persen		
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melakukan deteksi dini faktor	50 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas	75 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Case Detection Rate (CDR) TB	70 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	persentase Kasus HIV/AIDS yang	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	persentase penanggulangan bencana yang teratasi	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Dibayarkannya honor pegawai kontrakdan	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Persentase pelayanan kesehatan gizi	85 persentase		
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi	3 kegiatan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Persentase Lingkungan sehat (%)	79 persen		
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan	6 puskesmas	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Gangguan jiwa dan NAPZA yang	100 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase upaya kesehatan khusus yang	78 persen	Kota Sawahlunto	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Persentase penyakit menular dan tidak	92 persen	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota	21000 orang	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	7868 Orang		
								persentase cakupan pelayanan kesehatan	16 persen		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar	13003 orang		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	16674 Orang		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	10152 Orang		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	9172 Orang		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	5958 Orang		
								Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional	5821 Orang		
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kesehatan/Kota Sehat	Status sehat Kota Sawahlunto	3 level	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas	12 bulan		
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi kota dengan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Jumlah distribusi obat dan alat kesehatan	12 bulan		
								Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggarakan Bantuan operasional	7 Puskesmas dan Dinkes		
								Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai	6 Puskesmas		
								Jumlah Unit Penanggulangan gawat	1 unit		
								Laporan Kegiatan lembur P3K dan Dokter	12 bulan		
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Survey ulang akreditasi yang terlaksana	1 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100 persen		
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit	100 persen	Kota Sawahlunto	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara							
							1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dokumen		
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Keluarga Sehat	31 persen	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat							
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang berprestasi	1 fasyankes	Kota Sawahlunto	
								Jumlah tenaga kesehatan teleduk	9 tenaga		
							1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	423 orang	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Jumlah pasien rujukan yang di terima	100 persen		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP							
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang dilatih dalam penggunaan obat yang	71 persen	Kota Sawahlunto	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training,	12 bulan		Kota Sawahlunto	
								Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat	13 orang			
								Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang	2 kali			
								Jumlah dokter dan bidan terlatih APN	10 orang			
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro, Kecil dan Perseorangan								
							1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	93 persen		Kota Sawahlunto	
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas								
							1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan	Persentase pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	62 persen		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu							
							1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	78 persen	Kota Sawahlunto	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan							
							1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Persentase kualitas air minum masyarakat yang memenuhi syarat	27 TPM dan DAM	Kota Sawahlunto	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan							
							1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Persentase tindak lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada	91 persen	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan							
							1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	91 persen	Kota Sawahlunto	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat							
							1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Laporan Per Tahun Komisi Penanggulangan HIV/Aids (KPA)	1 laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah anggota Pramuka SBH yang mendapatkan informasi	120 orang		
								Jumlah kebijakan yang mendukung PHBS	2 buah		
								Jumlah kegiatan perkemahan yang	4 kali		
								Jumlah ormas dan dunia usaha yang	3 buah		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Jumlah media promosi yang dicetak (item)	10 item	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Jumlah kegiatan GERMAS yang	4 kali		
								Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	1 kali		
								Jumlah pakaian khusus yang diadakan (stel)	0 stel		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Terpadu							
							1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang)	995 orang	Kota Sawahlunto	
								dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13 bulan		
								Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri	1 desa/kel		
								Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan KKG PPK KB Kes	4 desa/kel		
								Jumlah kategori posyandu yang dinilai	6 kategori		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.03.01.2.02 Administrasi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	aparatur yang mengikuti pendidikan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum							
							1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang	25 unit	Semua Kabupaten/Kota	
								Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan		
								Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan		
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bahan bacaan dan perundang- undangan	12 Jenis	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan workshop/bengkel yang	15 unit	Kota Sawahlunto	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menunjang	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perengkapanyang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Kendaraan roda empat ,roda dua dan alat berat	12 bulan		
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Peralatan gedung	12 Bulan		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah							
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama	Pembangunan Gedung Posyandu Dusun Batang Lunto Ateh desa Lumindai	1 Paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.2.01.08 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang terpelihara	175000 meter	Kota Sawahlunto	
								Pemasangan Tali Bandar Sapan	1 Paket		
								Pembuatan Pagar Beton Tepi Sungai Batang Lunto dari Jembatan	300 meter		
								Normalisasi Saluran Air Pasar Remaja dari Pasar Baru Sawahlunto	1 Paket		
								Normalisasi Sungai Malakutan	1 Paket		
								Pemasangan Bronjong Sawah Padang Sari	1 Paket		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha							
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas sawah yang beririgasi	40 ha	Kota Sawahlunto	
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	4000 m	Kota Sawahlunto	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di							
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/	Persentase pendampingan NUWSP	100 Persen	Kota Sawahlunto	
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Jumlah Jaringan perpipaan	100 SR	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas	7 Lokasi	Kota Sawahlunto	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah							
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga Terlayani akses sanitasi	216 KK	Kota Sawahlunto	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam							
							1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Dokumen Perencanaan Teknis drainase	10 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	panjang saluran drainase perkotaan	1.59 Km	Kota Sawahlunto	
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	0.25 Km	Kota Sawahlunto	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										
				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Perkotaan							
							1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan	Pemasangan Daam di Pondok Batu	45 meter	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				1.04.01.2.02 Administrasi								
							1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan		Kota Sawahlunto	
							1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	39 ob		Semua Kabupaten/Kota	
								tersedianya jasa jaminan pemeliharaan	12 bulan			
								Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 bulan			
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Pendidikan dan pelatihan formal yang	12 bulan		Semua Kabupaten/Kota	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum								
							1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan		Kota Sawahlunto	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ruang rapat yang diadakan	1 unit		Semua Kabupaten/Kota	
								jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	26 ob			
								Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
								Tersedianya alat dan bahan kebersihan	12 bulan			
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan		Kota Sawahlunto	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	12 bulan		Semua Kabupaten/Kota	
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12 bulan		Kota Sawahlunto	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan	12 bulan		Kota Sawahlunto	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	mebeleur ruang rapat yang disediakan	1 paket		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menuntut	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	78 ob	Kota Sawahlunto	
								Terlaksananya penyediaan surat	12 bulan		
							1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah alat berat yang dipelihara	3 unit		
							1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Tersedianya pemeliharaan Gedung	12 bulan	Kota Sawahlunto	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program							
							1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang dirusak	10 unit	Kota Sawahlunto	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau							
							1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah kamar Rusunawa yang	194 Kamar	Kota Sawahlunto	
								jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	26 Ob		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU							
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Rehab Masjid Nurul Ikhlas Tanah Lapang Kecamatan Lembah	1 Paket	Kota Sawahlunto	
								Pembuatan Pagar Mushola Nurul Ikhlas Padang Datar desa Talawi Hilir Kecamatan	1 Paket		
								jumlah pegawai non PNS yang diharapkan meningkatnya jumlah prasarana dan utilitas umum di perumahan	52 ob		
									39 paket		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.05.01.2.02 Administrasi							
							1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jasa administrasi keuangan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Damkar	135 Stel lengkap		
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang	8 kali	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang	14 Kali		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum							
							1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 Bulan		
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	43 Unit		
								Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Dokumentasi yang	8 Jenis		
								Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang	12 Bulan		
								Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	12 Bulan		
								Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan		
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah makanan dan minuman yang	12 Bulan		
								Jumlah logistik kantor yang disediakan	12 Bulan		
								Bahan logistik yang disediakan (bulan)	12 Bulan		
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang	12 Bulan		
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang)	290 Orang	Kota Sawahlunto	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
							1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Pelatihan yang terlaksana (Kegiatan)	6 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	Jumlah alat penanggulangan bencana yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang	7 Jenis	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Jumlah peserta Pelatihan KSB (Orang)	85 Orang	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pasca Bencana yang	30 kasus	Kota Sawahlunto	
								Dana Operasional	1 Paket		
								Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	1 Paket		
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah personel TRC yang mengikuti diklat	4 Orang	Kota Sawahlunto	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban							
							1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan Darurat bencana yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah Kejadian Bencana yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah logistik yang tersedia (Jenis)	8 Jenis	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan								
							1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Protap Tanggap Darurat yang disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran								
							1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Kasus Bencana yang ditangani	50 Kasus	Kota Sawahlunto		
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Jumlah kasus kebakaran yang	50 Kasus	Kota Sawahlunto		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan								
							1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan edukasi	80 Orang	Kota Sawahlunto		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				1.06.01.2.02 Administrasi								
							1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS lainnya	13 bulan	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen laporan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah pegawai yang menyusun dokumen laporan akuntansi dan	2 Orang		
								jumlah jasa administrasi keuangan	5 keg		
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	jumlah pegawai yang disiplin berpakaian	32 orang	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	jumlah pegawai yang mengikuti	17 orang	Semua Kabupaten/Kota	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum							
							1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	jumlah komponen alat listrik yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah gaji pegawai tidak tetap	5 org	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah bahan kebersihan yang	12 bulan		
								Jumlah atk yang disediakan	12 bulan		
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya kebutuhan logistik kantor	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								jumlah makanan dan minuman yang	12 bulan		
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan serta	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		0	Kota Sawahlunto	
								jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang	12 bulan		
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah rapat2 yang diikuti	12 bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	jumlah peralatan gedung kantor yang	5 unit	Kota Sawahlunto		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								
							1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pegawai yang mengevaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	jumlah rekening telpon, air dan listrik yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota		
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	17 unit	Kota Sawahlunto		
							1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	jumlah gedung kantor yg dipelihara	4 unit	Kota Sawahlunto		
								jumlah peralatan gedung kantor yang	30 unit			
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah								
							1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah PSM dan TKSK yang dibina	41 og	Kota Sawahlunto		
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	jumlah PSM dan TKSK yang mendapat bantuan tali asih	41 Orang	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Petugas pengelola logistik bencana	1 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	12 Bulan		
								Jumlah karang taruna	38 Karang taruna		
								Jumlah anggota tagana	29 Orang		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan							
							1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi	35 org	Kota Sawahlunto	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat	35 org	Kota Sawahlunto	
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi alat bantu	18 org	Kota Sawahlunto	
								Jumlah penyandang cacat yang diberi alat	17 null		
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	jumlah penderita	5 Orang	Kota Sawahlunto	
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial	4 org	Kota Sawahlunto	
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan	77 org	Kota Sawahlunto	
								Jumlah laporan KPM yang mendapatkan	12 bulan		
								Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi	20 kebutuhan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam	100 %						
							2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara Forum OPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto		
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
							2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
								Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum, Cleaning Service dan	6 Orang			
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)	38 %						
							2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Aparatur yang mengikuti pendidikan	12 Orang	Semua Kabupaten/Kota		
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
							2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
								Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD	12 Bulan			
							2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan gedung kantor yang disediakan	12 Jenis	Semua Kabupaten/Kota		
								Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan			
								Dokumentasi dan dekorasi yang	12 Bulan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan		
								Peralatan gedung kantor UPTD BLK yang	12 Bulan		
								Jasa kebersihan UPTD BLK yang disediakan	12 Bulan		
								Honorarium Non PNS (Cleaning Service	1 Orang		
								Alat tulis kantor UPTD BLK yang disediakan	12 Bulan		
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Legistik Kantor	Pelaksanaan Bulan K3	1 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Makan dan minum yang disediakan	12 Bulan		
								Makan dan minum UPTD BLK yang	12 Bulan		
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Barang cetakan dan penggandaan UPTD	12 Bulan		
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK yang	12 Bulan		
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan					
							2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	Kota Sawahlunto	
							2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan	1 paket	Kota Sawahlunto	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan					
							2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum)	4 Orang		
								Jasa surat menyurat UPTD BLK yang	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD BLK yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota Kota	
								Jumlah komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan		
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan					
							2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								BBM Kendaraan dinas UPTD BLK	12 Bulan		
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Tersedianya Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Kota Sawahlunto	
								Gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan		
								Jumlah sarana dan prasarana BLK yang	1 Unit		
							2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana	Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang	1 Dokumen					
							2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi (%), Persentase peserta pelatihan yang	5010 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat	16 Orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 Orang			
								Jumlah peserta pelatihan otomotif yang	16 Orang			
								Jumlah peserta pelatihan menjahit yang	32 Orang			
								Jumlah peserta pelatihan Auto CAD	16 Orang			
							2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi	3 Orang		Kota Sawahlunto	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
				2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase siswa yang meningkat pemahamannya tentang dunia kerja	70 %						
							2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Peserta	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan	200 Orang		Kota Sawahlunto	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi	Persentase tenaga kerja yang	25 %						
							2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	BKOL yang dikelola	1 Unit		Kota Sawahlunto	
								Honorarium Non PNS (Staf Adm Umum dan Petugas BKOL Bidang	2 Orang			
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	1600 Lowongan		Kota Sawahlunto	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Persentase peserta sosialisasi/pelatihan yang ditempatkan di luar negeri (%)	5 %						
							2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri	10 Orang		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha							
							2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	Jumlah lembaga desa/kel yang dibina PHA	37 lembaga	Kota Sawahlunto	
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah lembaga pemenuhan Hak anak	1 lembaga	Kota Sawahlunto	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak							
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah peserta yang mendptkan KIE pemenuhan hak anak	60 org	Kota Sawahlunto	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat							
							2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Jumlah peserta konvesi hak anak yang mengikuti kegiatan penguatan jejaring	60 org	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus								
							2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah peserta peningkatan sumberdaya lembaga penyedia layanan ABK	100 org	Kota Sawahlunto		
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
							2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	laporan forum OPD	1 laporan	Kota Sawahlunto		
				2.09.01.2.02 Administrasi								
							2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 bulan	Kota Sawahlunto		
							2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota		
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum								
							2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 bulan	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah Barang yang diadakan	4 jenis		
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	1 unit	Kota Sawahlunto	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Ketersediaan biaya pemeliharaan dan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Ketersediaan biaya pemeliharaan peralatan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah gedung yang dibangun	1 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan							
							2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah laporan fasilitasi pendampingan penyediaan sarana	1 laporan	Kota Sawahlunto	
							2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Jumlah desa menuju mandiri pangan yang	4 desa	Kota Sawahlunto	
								Kelompok tani pelaksana desa mandiri	2 desa		
								jumlah sarana pendukung lainnya	4 paket		
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi							
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan	jumlah lembaga yang dibentuk dan dibina	1 unit usaha	Kota Sawahlunto	
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan	jumlah RUPM dan TTI yang dibina	3 unit	Kota Sawahlunto	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis								
							2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata	Dokumen KLHS RT/RW yang Direvisi	1 Dokumen	Kota Sawahlunto		
							2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang Dibuat	Dokumen KLHS RPJMD yang Dibuat	1 Dokumen	Kota Sawahlunto		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan								
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang	Kota Sawahlunto		
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah UPTD laboratorium	1 Unit	Kota Sawahlunto		
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau								
							2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	luas lahan tambang yang direklamasi	10 hektar	Kota Sawahlunto		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman								
							2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	7 orang	Kota Sawahlunto		
								Luas hutan kota yang dilelebas	5 Ha			
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah lampu hias taman yang dilelebas	327 titik	Kota Sawahlunto		
								jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	39 orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah taman kota yang dimiliki	69 lokasi		
							2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	9 orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah tanaman hias yang dibiakkan	125000 tanaman		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah							
							2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau	Jumlah laporan pengawasan LB3 yang dibuat	3 dokumen	Kota Sawahlunto	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh							
							2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan	jumlah dokumen lingkungan hidup yang	3 dokumen	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	39 ob	Kota Sawahlunto	
								jumlah usaha yang diawasi dan dipantau	30 usaha		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan							
							2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi kampung iklim yang dibentuk	2 lokasi	Kota Sawahlunto	
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah sekolah yang mengikuti program	6 sekolah	Kota Sawahlunto	
								Jumlah siswa-i anggota saka kalpataru yg menjadi pelopor	20 orang		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah							
							2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah lokasi Adipura yang dipantau dan dibenahi	38 lokasi	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dalam peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	4 kegiatan		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah							
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan	Jumlah peralatan daur ulang yang diadakan	1 unit	Kota Sawahlunto	
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	jumlah pegawai non PNS yang dibayarkan	105 orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah penanganan sampah yang dilakukan	1 kegiatan		
							2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	pengadaan pakain lapangan	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah sarana dan prasarana sampah yang	1 paket		
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.12.01.2.02 Administrasi							
							2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN PNS yang dibayarkan	14 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Tersedianya honorarium	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedia Gaji Pegawai Non PNS Bendahara	13 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah petugas pelayanan yang disediakan pakaiannya	45 Orang	Semua Kabupaten/Kota Kota		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum								
							2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik yang	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gaji Non PNS Petugas	13 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
								bahan dan alat kebersihan yang	12 bulan			
								Jumlah atk yang dibeli (bulan)	12 bulan			
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang tersedia	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota		
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	jenis bahan bacaan dan peraturan Per UU yang	3 Jenis	Kota Sawahlunto		
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan	Kota Sawahlunto		
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang	1 Paket	Kota Sawahlunto		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								
							2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyerat	Tersedianya Gaji Non PNS Asesoris	13 bulan	Kota Sawahlunto		
								Jml pemakaian jasa pos (bulan)	12 bulan			
								Jumlah materai 3000 yang disediakan (bulan)	12 bulan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah materai 6000 yang disediakan (bulan)	12 bulan		
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Gaji Non PNS Supir	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah kendaraan dinas roda empat yang	6 unit		
								Jumlah kendaraan dinas roda dua yang	10 unit		
							2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Tersedianya Gaji Non PNS Penjaga malam	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset	12 bulan		
								Jumlah frekwensi pemeliharaan taman	12 bulan		
								Rehab bangunan dan	1 paket		
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah meubilair yang dipelihara (jenis)	5 Jenis	Kota Sawahlunto	
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	10 Jenis		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										
				2.12.02.2.01 Pelayanan							
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen akta kelahiran, Akta Kematian, Jumlah Pelayanan KTP, KK dan Jumlah Surat Pindah	5466 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah laporan Pelaksanaan pelayanan	15 kali		
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai	Jenis blanko /formulir yang disediakan (paket)	12 paket	Kota Sawahlunto	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan							
							2.12.02.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi	12 laporan	Kota Sawahlunto	
							2.12.02.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah KK yang di Data	3000 Kartu Keluarga	Kota Sawahlunto	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL										
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan							
							2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan	Tersedianya Gaji Non PNS Petugas Pelayanan Adminduk	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat pernikahannya di Pemerintah	80 pasangan		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penilaian Database							
							2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data Yang Di	5 Data	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Kader KB yang difasilitasi	235 orang		
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di							
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru	857 PUS	Kota Sawahlunto	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan							
							2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina	37 kelompok	Kota Sawahlunto	
								Jumlah PIK-R yang Terbina	23 kelompok		
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kader KB yang dibina dan Terampil	85 orang	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah Peserta/ Duta GenRe yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Duta GenRe	60 orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah Peserta /Keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional	1000 orang			
								Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi	60 orang			
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				2.15.01.2.02 Administrasi								
							2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan		Kota Sawahlunto	
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah administrasi keuangan yang	12 bulan		Semua Kabupaten/Kota	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	48 stel		Semua Kabupaten/Kota	
							2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji	23 orang		Semua Kabupaten/Kota	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum								
							2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	12 bulan		Kota Sawahlunto	
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Ketersediaan Dokumentasi dan	12 bulan		
								Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan		
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Legistik Kantor	Forum OPD yang dilaksanakan	1 kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah makanan dan minuman tamu dan	12 bulan		
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Penyediaan buku profil	1 Buku	Kota Sawahlunto	
								Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun		
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi ke dalam	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	Kota Sawahlunto	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	Kota Sawahlunto	
							2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ								
							2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan	Jumlah pelaksanaan Wahana Tata Nugraha	1 kegiatan	Kota Sawahlunto		
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di								
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang	3161 Unit	Kota Sawahlunto		
								Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan	1 paket			
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah lampu PJU yang dipasang	745 Unit	Kota Sawahlunto		
								Jumlah perlengkapan jalan yang dibeli	5 jenis			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan								
							2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah peralatan pengujian kendaraan	6 unit	Kota Sawahlunto		
							2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala	1100 unit	Kota Sawahlunto		
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana Pengujian kendaraan Bermotor	1 gedung	Kota Sawahlunto		
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan								
							2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	4 kegiatan	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah							
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Jumlah kegiatan jumpa pers	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah media penyampaian informasi	3 paket		
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pembayaran gaji non ASN	2 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah media massa yang bekerjasama	1 paket		
								Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM	12 Bulan		
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (ke)	3 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	12 Dokumen	Kota Sawahlunto	
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										
				2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah							
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Gaji Non ASN	3 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah hot spot yang dikelola	15 titik		
								Terkelolanya website panka	12 Bulan		
							2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Terkelolanya e-government	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.17.01.2.02 Administrasi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan PNS	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Aparatur yang mengikuti pendidikan	38 %	Semua Kabupaten/Kota	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum							
							2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan		
								Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	12 Bulan		
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara	16 Unit	Kota Sawahlunto	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Mobiler kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya								
							2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1 Aplikasi	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	4 Laporan			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam								
							2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat	50 Unit	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi berprestasi tingkat	1 Koperasi	Kota Sawahlunto	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan							
							2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi	120 Orang	Kota Sawahlunto	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan							
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Persentase UMKM yang difasilitasi	4 %	Kota Sawahlunto	
							2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi	200 UMKM	Kota Sawahlunto	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal								
							2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Honorarium Non PNS (Staf Bidang Perizinan)	8 Orang	Kota Sawahlunto		
								Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan perizinan	1500 Dokumen			
								Jumlah non perizinan yang diterbitkan	550 Dokumen			
								Jumlah perizinan yang diterbitkan	620 Dokumen			
								Jumlah peserta sosialisasi perizinan	200 Orang			
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	Laporan monitoring dan evaluasi penertiban	4 Laporan	Kota Sawahlunto		
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Penyelesaian permasalahan tentang perizinan dan non perizinan	4 Kasus	Kota Sawahlunto		
							2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian	Sertifikat ISO 9001:2015	1 Sertifikat	Kota Sawahlunto		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi								
							2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Honorarium Non PNS (Staf pada Bidang Advokasi dan	1 Orang	Kota Sawahlunto		
								Laporan kelengkapan adm perusahaan	1 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Laporan LKPM	6 Laporan		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							
							2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak	Berita acara forum OPD	1 Berita Acara	Kota Sawahlunto	
								Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan	1 Dokumen		
				2.19.01.2.02 Administrasi							
							2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Diikutinya pendidikan pelatihan formal	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum							
							2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jenis Komponen listrik yang tersedia	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jenis ATK yang	12 Bulan		
								Pengadaan alat kebersihan dan bahan	12 Bulan		
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,							
							2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi Paskibraka	67 Orang	Kota Sawahlunto	
							2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	Jumlah peserta yang Memperingati HAORNAS	400 Orang	Kota Sawahlunto	
								Lomba Drumband dan Pelatihan untuk pelatih	1 Paket		
								Terlaksananya upacara bendera memperingati	1 Kegiatan		
							2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Jumlah lapangan bola kaki desa lunto timur yang direhab	1 Paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Pagar kawat lapangan volly gunung timbago kelurahan	1 Paket		
								Jumlah peralatan panahan pencab panahan kota sawahlunto yang	1 Paket		
								Jumlah sarana dan prasarana pemuda	1 Paket		
								Jumlah lapangan basket yang direhab	1 Paket		
								Jumlah Kanopi & penerangan lapangan	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.19.02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH								
							2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PEMBERDAYAAN Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis bagi pemuda yang potensial	30 Orang		Kota Sawahlunto	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan								
							2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti paralimpik	5 Cabang		Kota Sawahlunto	
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan	3 Paket		Kota Sawahlunto	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah								
							2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan	Jumlah atlit pelajar yang berprestasi	65 Orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah atlit yang berprestasi tingkat	150 Orang			
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah atlit pelajar yang berprestasi	2 Orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah atlit yang berprestasi tingkat	3 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah							
							2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Jumlah regulasi tentang persandian	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Jumlah perangkat keras persandian	84 Unit	Kota Sawahlunto	
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	12 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							
							2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita acara forum OPD	1 Berita Acara	Kota Sawahlunto	
								Ketersediaan Dokumen perencanaan tahunan	1 Dokumen		
				2.22.01.2.02 Administrasi							
							2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.22.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							2.22.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum								
							2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jenis Komponen listrik yang tersedia	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat kebersihan dan bahan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
								Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan			
								Perlengkapan Kantor yang diadakan	12 Bulan			
								Jenis ATK yang	12 Bulan			
							2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak yang tersedia	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
							2.22.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
				2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							2.22.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1 Unit	Kota Sawahlunto		
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								
							2.22.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menuntut	Pengadaan surat menuntut	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas dan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.22.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mobiler kantor yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah							
							2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah balai/rumah adat yang terfasilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto	
								Jumlah MoU kebudayaan yang aktif	3 MoU		
								Jumlah komunitas Kenagarian yang	21 Kelompok		
								Jumlah kelompok budaya yang tampil	18 Kelompok		
								Jumlah Event Pekan Budaya Sawahlunto	1 Event		
								Jumlah peserta yang menikuti Singsing	80 Peserta		
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah							
							2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah group randai yang mengikuti festival	52 Group	Kota Sawahlunto	
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah peserta workshop	70 Orang	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah								
							2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber	Jumlah pembuatan film yang terfasilitasi	1 film	Kota Sawahlunto		
								Jumlah kelompok seni dan budaya yang	10 Kelompok			
								Jumlah pentas seni yang difasilitasi	51 Penampilan			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah								
							2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan	Jumlah dokumen hasil kajian	2 Dokumen	Kota Sawahlunto		
								Jumlah siswa yang mengikuti lomba	250 Orang			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat								
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang difasilitasi	10 Unit	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	4 Laporan			
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat								
							2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah bangunan/kawasan	2 Unit	Kota Sawahlunto		
								Jumlah dokumen Kajian	1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Persentase kelengkapan dokumen	1 %	Kota Sawahlunto	
								Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang		
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum							
							2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Jumlah paket media informasi yang disusun	10 Paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah koleksi yang diolihara	50 Koleksi		
								Jumlah koleksi museum yang diadaka	25 Koleksi		
							2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas	Jumlah Pengelola Museum yang	35 Orang	Kota Sawahlunto	
							2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat	Jumlah pameran yang dilaksanakan dan	5 Event	Kota Sawahlunto	
							2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya Museum Goedang Ransoem	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Terpeliharanya museum kota	12 Bulan		
								Terpeliharanya iptek	12 Bulan		
								Terpeliharanya infobox	12 Bulan		
								Terpeliharanya museum budaya	12 Bulan		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.23.01.2.02 Administrasi							
							2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola keuangan	2 orang	Semua Kabupaten/Kota Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya	12 bulan		
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum							
							2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan		
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Listrik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Tersedianya kebutuhan listrik kantor (bulan)	12 bulan		
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang	3 unit	Kota Sawahlunto	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Tersedianya jasa komunikasi listrik, air	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (Bulan)	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	3 unit	Kota Sawahlunto	
								Terehabilitasinya gedung perpustakaan	1 paket		
							2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (bulan)	12 bulan	Kota Sawahlunto	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah							
							2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Terpeliharanya jaringan aplikasi Perpustakaan	1 paket	Kota Sawahlunto	
							2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Jumlah Pemustaka yang terfasilitasi	61000 orang	Kota Sawahlunto	
								Tersedianya pembayaran jasa staf pengelola	7 orang		
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan	Jumlah Perpustakaan yang dibina (unit)	50 unit	Kota Sawahlunto	
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek	70 orang	Kota Sawahlunto	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan	2 paket	Kota Sawahlunto	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan	4000 buku	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi (OPD)	3 OPD	Kota Sawahlunto	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat							
							2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah OPD/unit kerja yang dibina (unit kerja)	63 unit kerja	Kota Sawahlunto	
								Jumlah OPD/unit kerja yang mengelola arsip sesuai dengan standar	45 persen		
								Tersedianya pembayaran jasa staf	1 orang		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala							
							2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan	1 kegiatan	Kota Sawahlunto	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil							
							2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan	Jumlah arsip statis yang dialih bahasakan (lembar)	120 lembar	Kota Sawahlunto	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang							
							2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Jumlah arsip yang digandakan (paket)	1 paket	Kota Sawahlunto	
								Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai	37 unit kerja		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan pengembangan objek wisata,	147147 %						
							3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen master plan/site plan dan study kelayakan	7 dokumen	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Dokumen revisi Rincian yang terusun	1 dokumen			
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata								
							3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan dokumen pengusulan	75 %	Kota Sawahlunto		
							3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah laporan monev industri kepariwisataan	4 Laporan	Kota Sawahlunto		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata								
							3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi Kawasan Geopark Batu Runcing yang	1 Objek	Kota Sawahlunto		
								Jumlah destinasi Taman Satwa Kandih	1 Objek			
								jumlah paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Cemara yang	1 Objek			
								Jumlah wahana air yang dikemas (paket)	1 Paket			
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara	1 Objek	Kota Sawahlunto		
								Terpeliharanya objek wisata yang dikelola	5 Objek			
							3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tingkat kepuasan pengunjung terhadap	2 Dokumen	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah laporan monitoring	4 Laporan		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kemampuan Strategis	Jumlah Kunjungan rombongan wisata	70 Rombongan					
							3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	Jenis Media Promosi	3 Jenis	Kota Sawahlunto	
								Jumlah teknologi informasi yang dikelola	3 Jenis		
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan	1 Event	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang	4 Event		
								jumlah event promosi pariwisata yang diikuti	6 Event		
								Jumlah Event Sport Tourism yang	10 Event		
								Jumlah Festival Prof M.Yamin yang	1 Event		
								Jumlah group peserta SIMFes yang tampil	7 Group		
								Jumlah Kunjungan Event Sport Tourism	10 Orang		
								Jumlah Peserta Event Fotografi dan	4 Orang		
								Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi	15 Orang		
							3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah MoU aktif yang dihasilkan	15 MoU	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
				3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi								
							3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Bantuan Prasarana Perbaikan Fasilitas kamar dan toilet kepada Asosiasi	1 Paket		Kota Sawahlunto	
								Jumlah peserta workshop ekonomi	30 Orang			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia								
							3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa	Jumlah anggota asosiasi yang meningkat SDM nya	1 Orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah pelaku pariwisata yang	50 Orang			
							3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja	Jumlah Industri pariwisata yang	5 Sertifikat		Kota Sawahlunto	
								Jumlah Pelaku Industri pariwisata yang	5 Sertifikat			
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi	Jumlah Event Festival Sawahlunto Kreatif	2 Event		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah laporan monev	4 Laporan		
								Jumlah pelaku ekonomi kreatif	300		
								Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti	30 Orang		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana							
							3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	80 %	Kota Sawahlunto	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Kelompok yang Didampingi	25 kelompok	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan data Tanaman Pangan dan	12 laporan		
								Jumlah sarana yang difasilitasi	2 unit		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme							
							3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG	jumlah komoditi yang dimurnikan/dilestarikan	2 komoditi	Kota Sawahlunto	
								jumlah produksi benih padi	2500 kg		
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang	20 ha	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan	11719 batang		
								Luas Lahan yang Dipelembaga	15 ha		
								Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya	30 ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit yang Dibagikan	3000 batang	Kota Sawahlunto	
								Operasional Pemeliharaan	12 bulan		
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Sawahlunto							
							3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti	4 kategori	Kota Sawahlunto	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Sawahlunto							
							3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Akseptor IB	1200 unit	Kota Sawahlunto	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Sawahlunto							
							3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya	Jumlah Populasi Ternak	1690 ekor	Kota Sawahlunto	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										
				3.27.03.2.01 Pengembangan							
							3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 dokumen	Kota Sawahlunto	
				3.27.03.2.02 Pembangunan							
							3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi	38 ha	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi	150 ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian	1200 meter	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian	1200 meter		
							3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah RPH/TPH yang dikelola	2 unit	Kota Sawahlunto	
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan	7 paket	Kota Sawahlunto	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah							
							3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan	6 kali	Kota Sawahlunto	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner							
							3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sample yang di analisis	400 sampel	Kota Sawahlunto	
							3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan	6000 dosis	Kota Sawahlunto	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat							
							3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang	4 unit	Kota Sawahlunto	
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sample yang di analisis	30 sampel	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
							3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Jumlah tupai yang terbunuh	2000 ekor		Kota Sawahlunto	
								Luas Lahan yang difasilitasi	100 ha			
								Luas Lahan yang difasilitasi	30 ha			
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan								
							3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah kelembagaan penyuluhan yg	5 lembaga		Kota Sawahlunto	
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah kelompok yang naik scor	180 kelompok		Kota Sawahlunto	
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah BPP yg difasilitasi	4 BPP		Kota Sawahlunto	
								Jumlah penyuluh yang difasilitasi	30 orang			
							3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah badan usaha yg dibentuk	1 unit		Kota Sawahlunto	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana								
							3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen grand desain	1 Dokumen		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan							
							3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	laporan pelaksanaan tera dan tera ulang	2 laporan	Kota Sawahlunto	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk							
							3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	jumlah UMKMyang mengikuti pameran hari	30 UMKM	Kota Sawahlunto	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri							
							3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Kota Sawahlunto	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	jumlah IKM yang terfasilitasi	4 IKM	Kota Sawahlunto	
								Jumlah outlet yang berkembang	1 outlet		
								Jumlah produk IKM yang mempunyai	10 produk		
								jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5	1 sentra industri		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah teknologi industri yang	20 unit		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	dekranasda yang dikelola	12 bulan	Kota Sawahlunto	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA										
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)							
							3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami (IKM)	2 IKM	Kota Sawahlunto	
								jumlah IKM yang diawasi dan dievaluasi	100 IKM		
								jumlah laporan koordinasi dan	12 laporan		
								jumlah orang yang terampil-membaca	2 orang		
								jumlah produk IKM yang bersertifikasi AKC	10 produk		
								jumlah produk IKM yang bersertifikasi halal	10 produk		
								jumlah produk IKM yang mempunyai HKI,	5 produk		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	jumlah aplikasi data informasi industri yang	1 aplikasi	Kota Sawahlunto	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				4.01.01.2.02 Administrasi							
							4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Gaji Non ASN	5 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan		
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun	13 Laporan	Kota Sawahlunto	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan	30 orang	Semua Kabupaten/Kota	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum							
							4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan rumah tangga yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan		
								Gaji Non ASN	1 Orang		
								Gaji Non ASN	12 Orang		
								Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah cenderamata yang disediakan	187 buah		
								jumlah peralatan rumah kantor yang	13 jenis		
								Pembayaran Jasa Staff	3 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Jasa Staff	5 Orang		
								Makan dan minum rapat, dan makan pegawai tertentu yang	12 Bulan		
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah kerjasama media massa	20 Media	Kota Sawahlunto	
								Gaji Non ASN	2 Orang		
							4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu - Tamu Daerah dan Tamu - Tamu Kepala Daerah yang di	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Jasa Staff	12 Orang		
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	Kota Sawahlunto	
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess	25 unit	Kota Sawahlunto	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Gaji Non ASN	3 Orang		
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Gaji Non ASN	1 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Jasa komunikasi sumber daya air dan	12 bulan		
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota	1 kegiatan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Pembayaran Jasa Staff	6 Orang	Kota Sawahlunto		
								Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess	12 bulan			
								Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			
								Pembayaran Jasa Staff	17 Orang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala								
							4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil	13 Bulan	Kota Sawahlunto		
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan	1 tahun	Kota Sawahlunto		
								Pembayaran Jasa Staff	2 Orang			
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Belanja Operasional Walikota dan Wakil	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan								
							4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Tersedianya biaya rumah tangga wako	12 bulan	Kota Sawahlunto		
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang			
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Tersedianya Biaya Rumah Tangga Wakil	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi								
							4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah produk hukum daerah SOTK yang	5 Dokumen	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah kelembagaan dan permasalahan yang	26 Kegiatan		
								Jumlah dokumen evaluasi jabatan dan	1 Dokumen		
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang		
								Jumlah peserta forum komunikasi	20 Orang		
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pembayaran Jasa Staff	1 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi	26 OPD		
								Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran	5 OPD		
								Jumlah OPD yang mengikuti penyusunan	26 OPD		
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta bintek Penggunaan road map Granddesign reformasi	65 Orang	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang		
								Jumlah LKJiP Kota	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang	1 Dokumen		
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi							
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Binaan	Jumlah kegiatan jumpa	12 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Turun Binaan	Jumlah kegiatan yang didokumentasikan	300 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah media penyampaian informasi	6 Media		
								Gaji Non ASN	3 Orang		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Buku Pengabdian Kepala	2 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen LPPD yang disusun	1 Dokumen		
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kelurahan	Jumlah unsur rupa bumi yang dibelukan	100 jenis	Kota Sawahlunto	
								Jumlah rapat pemerintahan terdepan	12 Kali		
								Jumlah peserta bimbingan dan	41 orang		
								Jumlah camat yang diteliti	4 Orang		
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang		
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otanami Daerah	Jumlah OPD yang melakukan SBM	6 OPD	Kota Sawahlunto	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan							
							4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah hari besar islam yang diperingatid Nagari,Gharim Masjid dan mushalla, dan	6 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah jama	80 Orang		
								Jumlah kafilah MTQ Kota Sawahlunto	110 Orang		
								Jumlah kelompok didikan subuh yang	5 Kelompok		
								Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren	4000 Oarang		
								Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang		
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan open house bulan ramadhan dan hari raya yang	3 Kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari,Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara	606 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah imam masjid yang disertifikasi setara	20 Orang		
						4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan		Jumlah Pertemuan Tokoh Adat, Agama, dan Bundo Kandung	4 Kali	Kota Sawahlunto	
								Belanja hibah ke Masjid/Mushalla	1 Tahun		
								Belanja hibah ke PDM	1 Tahun		
								Belanja hibah ke BAZ	1 Tahun		
								Jumlah Pertemuan Silaturahmi Tim Safari Ramadhan dengan	75 Kali		
								Jumlah Hari Besar Nasional yang di	1 Kegiatan		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							
						4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah desa/kel yang diikuti dalam kegiatan penilaian	37 desa/kel	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang		
								Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan	600 Dokumen		
								Jumlah peserta publik hearing ranperda dan	100 Dokumen		
								Jumlah perda yang diumumkan	12 Dokumen		
						4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah penanganan perkara	12 Kasus	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Jasa Staff	2 Orang		
						4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan		Jumlah peserta penyuluhan hukum	100 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumentasi produk hukum daerah	2 Dokumen		
								Pembayaran Jasa Staff	1 Orang		
								Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi	400 JDH		
								Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang		
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama kegiatan yang	3 Dokumen	Kota Sawahlunto	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan							
							4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Tersedianya data pemanfaatan dana CSR	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Gaji Non ASN	1 Orang		
								Jumlah BUMD dan lembaga keuangan	7 null		
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk	4 Lapoaran	Kota Sawahlunto	
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan pelaksanaan monev perkembangan ekonomi masyarakat	2 Lapoaran	Kota Sawahlunto	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi							
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Gaji Non ASN	2 Orang		
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang							
							4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan sistem	4 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui	200 Kegiatan		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara	Jumlah standar pengelolaan LPSE ter-	17 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah pengadaan brg/jasa yang dikelola secara elektronik	200 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah laporan pengelolaan media	1 Dokumen		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Pembayaran Jasa Staff	1 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jmlah peserta	175 Orang		
								Jumlah bahan bacaan	20 Buah		
								Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan	12 Dokumen		
								Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pemantapan struktur organisasi pengadaan	4 Dokumen		
								Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				4.02.01.2.02 Administrasi							
							4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Lainnya	20 Orang	Kota Sawahlunto	
								Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan		
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah study banding yang dilaksanakan	6 Bulan		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dan	12 bulan		
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan fotocopy barang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan yang diadakan	2 bulan	Kota Sawahlunto	
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan yang dibeli	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Staf Administrasi Umum	14 orang		
								Pembayaran Tenaga Ahli Eksternal	6 orang		
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Tagihan listrik dan telepon kantor yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Tenaga Kebersihan	9 orang	Kota Sawahlunto	
								Tersedianya alat kebersihan kantor dan	12 bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Kantor	Tersedianya Mebeleur Kantor	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peselatan dan Mesin Lain-lainnya	Terpeliharanya peselatan gedung	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	12 bulan	Kota Sawahlunto		
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan								
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	12 bulan	Kota Sawahlunto		
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD								
							4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Ketersediaan jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota	20 bulan	Kota Sawahlunto		
							4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Pelantikan Antar Waktu Anggota	3 kali	Kota Sawahlunto		
								Tersedianya Cenderamata	120 paket			
							4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	150 Kali	Kota Sawahlunto		
								Tersedianya biaya perjalanan dinas luar	12 bulan			
							4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebanyakan Rumah Tenaga DPRD	Tersedianya biaya rumah tenaga	12 bulan	Kota Sawahlunto		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan								
							4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Pembayaran Tenaga Administrasi	2 Orang	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Ranperda Legislatif DPRD	2 buah			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan	13 buah		Kota Sawahlunto	
				4.02.02.2.02 Pembahasan								
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Pembayaran Tenaga Administrasi	1 orang		Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumen yang dibahas	5 buah			
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Berfungsi/awakel DPRD	Jumlah kegiatan yang dibahas	1 tahun		Kota Sawahlunto	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan								
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Terpenuhinya penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan		Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Tenaga Keuangan	4 orang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan								
							4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya SDM pimpinan dan Anggota	6 Kali		Kota Sawahlunto	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumentasi Anggota DPRD yang dihimpun/paket	20 kali		Kota Sawahlunto	
								Pemabayaran Tenaga Administrasi	1 orang			
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dialog yang dilaksanakan	5 kali		Kota Sawahlunto	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Terhimpunnya agenda kegiatan DPRD	12 bulan		Kota Sawahlunto	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan								
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD ke daerah Pemilihan/Anggota	3 kali		Kota Sawahlunto	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD								
							4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pembayaran Tenaga Administrasi	1 Orang		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan/Anggota	150 Kali		
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan					
							5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Pembayaran staff Administrasi Keuangan	1 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan		
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)	38 %					
							5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	Semua Kabupaten/Kota Kota	
								Aparatur yang mengikuti pendidikan	15 orang		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan					
							5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan Dekorasi dan Pakaian	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Pembayaran staff Kebersihan Kantor	1 Orang		
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	1 unit		
								Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian sistematika dokumen	100 %						
							5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli	1 Laporan	Kota Sawahlunto		
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas	Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja	26 Berita Acara	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan			
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD	1 Laporan	Kota Sawahlunto		
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 Aplikasi			
								Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi	1 Berita Acara			
								Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang	1 Dokumen			
								Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen			
								Pembayaran staff Programmer E-Monev	1 Orang			
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase kesesuaian sistematika dokumen	100 %						
							5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Data Perencanaan Yang	4275 Data	Kota Sawahlunto		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah laporan evaluasi perencanaan pembangunan	4 Laporan						
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Pembayaran staff Programmer E-Monev	1 Orang	Kota Sawahlunto		
								Jumlah Laporan Evaluasi yang	1 Laporan			
								Jumlah Laporan Monitoring yang	4 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah laporan perencanaan SDG	1 Laporan		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang	100 %					
							5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	4 Laporan	Kota Sawahlunto	
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan	1 laporan	Kota Sawahlunto	
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	4 laporan	Kota Sawahlunto	
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan	4 laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan	4 laporan		
								Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia	4 Laporan		
								Pembayaran staff Bidang Perencanaan	2 Orang		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan	1 laporan		
								Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan	1 Laporan		
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan	4 laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	4 laporan		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia	4 laporan		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA /Sumber Daya	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif Ke Dalam	100 %					
							5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 laporan		
								Pembayaran staff Subid bidang Perencanaan	2 Orang		
								Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	4 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 laporan		
								Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	1 laporan		
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan	4 laporan		
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber	4 laporan	Kota Sawahlunto	
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber	1 laporan	Kota Sawahlunto	
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber	4 laporan	Kota Sawahlunto	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan							
							5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan	10 Laporan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
							5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan	Kota Sawahlunto		
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)	50 %						
							5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Aparatur yang mengikuti pendidikan	34 Orang	Semua Kabupaten/Kota		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
							5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
								Dokumentasi dan dekorasi yang	12 bulan			
								Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan			
								Pembayaran Honorarium Cleaning	2 Orang			
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota		
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diadakan	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang	6 Unit	Kota Sawahlunto	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi	12 Bulan					
							5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi	9 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jasa Surat menyurat yang disediakan	12 Bulan		
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan					
							5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penetapan APBD	2 Tepat Waktu					
							5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PRAS	Jumlah dokumen KUA dan PRAS yang disusun	2 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang	2 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-	Jumlah SKPD yang di Review (SKPD)	29 SKPD	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah SKPD yang di Review (SKPD)	29 SKPD	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-	Jumlah SKPD yang di Review (SKPD)	29 SKPD	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah SKPD yang di Review (SKPD)	29 SKPD	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Dokumen APBD	6 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Perda dan Perwako APBD	2 Dokumen		
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah dokumen perubahan APBD	6 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Perda dan Perwako Perubahan	5 Dokumen		
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen standar satuan harga dan Petunjuk Teknis	2 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Honorarium Non PNS/Staf Bidang	3 Orang		
								Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah	700 Orang		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%), Persentase capaian realisasi anggaran (%), Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh pemeriksaan BPK (%), Persentase	100857560 %					
							5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan	Ketersediaan dana	12 Bulan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	Jumlah SPD yang diterbitkan	87 Berkas	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah laporan dana transfer	28 laporan	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Laporan kasda, aliran kas, PFK	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	Jumlah SP2D yang diproses	6750 Buah	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Gaji dan Bonus/Insentif SKPD	12 Bulan		
								Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan dengan OPD	26 OPD		
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah peserta sosialisasi	80 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Dokumen Juknis Adm Keuangan	10 Dokumen		
								Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi	800 Dokumen		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100 %					
							5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan SAKD	3 Laporan	Kota Sawahlunto	
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	12 Laporan	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumen rencana Pemeliharaan /	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan dan	16 Laporan	Kota Sawahlunto	
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi	6 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Asset yang	25 Unit		
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang	Jumlah PAD dari Hasil Pelelangan (Juta)	50 Juta	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Kendaraan dinas / Operasional	2 Unit		
								Jumlah Rumah Dinas dan gedung Lainnya	3 Unit		
								Jumlah Sewa Tanah dan Bangunan (Objek	27 Ojek Perjanjian		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian target PAD (%), Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB	9525 %					
							5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah laporan PBB dan BPHTB	15 Laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan	38 Dokumen		
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Jumlah media penyebarluasan	3 Media	Kota Sawahlunto	
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	4 Jenis	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-	27200 Objek Pajak		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Jumlah Dokumen database pendapatan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA	4 Laporan		
								Jumlah data Objek Pajak dan SUBjek PBB P2 serta BPHTB yang di pelihara dan di mutakhirkan (Objek	27200 OP		
								Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang	1 aplikasi		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Nilai PBB P2 dan BPHTB	1.85 Milyar	Kota Sawahlunto	
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Wajib Pajak	12 Laporan	Kota Sawahlunto	
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan Pajak dan Konsultasi	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi	3 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Laporan Pendaftaran Daerah	12 Laporan		
								Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang	27200 OP		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Honorarium Non PNS/Staf Bidang Adm Umum Bidang	4 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Penerimaan Pendaftaran Daerah	57 Milyar		
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang di	72 Kali		
								Jumlah Penerimaan BPHTB	700 juta		
								Jumlah Penerimaan	1.1 milyar		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				5.03.01.2.02 Administrasi							
							5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14 bulan	Kota Sawahlunto	
							5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah pegawai yang dibayarkan jasanya	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum							
							5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya komponen kelistrikan	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan) dan iuran restribusi kebersihan/sedot WC	12 bulan, triwulan	Semua Kabupaten/Kota Kota Sawahlunto	
								Tersedianya ATK	12 bulan		
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Legistik Kantor	Jumlah dekorasi dan Saendak	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya fotocopy, barang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar	12 bulan	Kota Sawahlunto	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	Kota Sawahlunto	
							5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang yang diadakan	1 Paket	Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								
							5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai (lembar), pengiriman	1440 Lembar	Kota Sawahlunto		
							5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota Kota		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
							5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua	6 Unit	Kota Sawahlunto		
								Terpeliharanya kendaraan dinas roda	4 Unit			
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Paket	Kota Sawahlunto		
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	Kota Sawahlunto		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi								
							5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan	130 Orang	Kota Sawahlunto		
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN	12 bulan	Kota Sawahlunto		
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang diperbaharui dan	12 bulan	Kota Sawahlunto		
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN								
							5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pejabat ASN yang mutasi, promosi, rotasi dan pensiun, kenaikan pangkat serta	400 Orang	Kota Sawahlunto		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				6.01.01.2.02 Administrasi								
							6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan		Kota Sawahlunto	
							6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2 Orang		Semua Kabupaten/Kota	
								Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Bulan			
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian								
							6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	17 Orang		Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah aparatur fungsional yang	18 Dokumen			
								Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan	14 Dokumen			
								Jumlah PAK JFA yang ditetapkan	22 Dokumen			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum								
							6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Bulan		Kota Sawahlunto	
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan		Semua Kabupaten/Kota	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumentasi dan dekorasi yang	12 Bulan		Kota Sawahlunto	
								Makan dan Minum yang disediakan	12 Bulan			
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Bulan		Semua Kabupaten/Kota	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		Kota Sawahlunto	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang diadakan	6 Unit	Kota Sawahlunto	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran staff Administrasi Umum	2 Orang	Kota Sawahlunto	
								Jasa surat menyurat yang diadakan	12 Bulan		
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang diadakan	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Pembayaran Petugas Kebersihan	1 Orang		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Pembayaran staff Penjaga Kantor	1 Orang	Kota Sawahlunto	
								Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan							
							6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Khusus	20 Objek	Kota Sawahlunto	
								Jumlah LHKPN	1 Laporan		
								Jumlah objek/laporan pemeriksaan	156 OK		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Pemeriksaan	4 Objek		
								Pembayaran staff Keuangan Program dan	2 Orang		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	Jumlah Rakor pengawasan yang diikuti	4 Kali	Kota Sawahlunto	
								Meningkatnya pembinaan dan	12 Bulan		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan							
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Meningkatkan Kesadaran Risiko Korupsi dan Perbaikan	1 Laporan	Kota Sawahlunto	
								Upaya Pencegahan dan Pemberantasan	12 Bulan		
								Meningkatnya Implementasi Maturitas	12 Bulan		
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kota	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
	7.01 KECAMATAN										
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				7.01.01.2.02 Administrasi							
							7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	13 bulan	Kota Sawahlunto	
								Gaji dan Tunjangan PNS	12 Bulan		
								Gaji dan Tunjangan PNS	13 Bulan		
							7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jasa administrasi keuangan yang	12 bulan		
								Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan dan gaji Non PNS administrasi	13 Bulan		
								Jumlah Jasa Administrasi keuangan	12 bulan		
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian							
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	1 paket		
								Jumlah PDUB Camat yang diadakan	1 paket		
							7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pendidikan dan latihan formal yang	9 kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang	10 kali		
								Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang	6 Kali		
								Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang	10 kali		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum							
							7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg	12 bulan		
								Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg	12 bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan dan gaji petugas kebersihan (CS) yang	13 Bulan		
								Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan		
								Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan		
								Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang	12 bulan		
								Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang	12 Bulan		
								Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang	12 bulan		
								jumlah komponen listrik yang disediakan	12 Bulan		
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Listrik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan	12 bulan	Kota Sewaktu	
								Jumlah makan dan minum yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah Makanan dan Minuman yang	12 bulan		
								Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 Bulan		
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang	12 bulan		
								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang	12 bulan		
								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan	2 Jenis	Kota Sawahlunto	
								Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan	3 jenis		
								Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan	3 jenis		
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi)	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Rapat koordinasi & konsultasi	12 bulan		
								Jumlah rapat koordinasi & konsultasi	12 bulan		
								Jumlah rapat koordinasi & konsultasi	12 bulan		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang	12 Unit	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Peralatan gedung kantor yg	3 jenis		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
							7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyerup	Jumlah materai yang disediakan (bulan)	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah materai yang disediakan	12 bulan		
								Jumlah materai yang disediakan dan gaji non pns administrasi umum	13 Bulan		
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Listrik	12 Rp	Semua Kabupaten/Kota	
								Air	12 Rp		
								Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan	12 bulan		
								Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Telenon, Air, Listrik, Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 bulan		
								Telpon	12 Rp		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							
							7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara (bulan)Jumlah kendaraan dinas roda 4	12 bulan		
								Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12 bulan		
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
							7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yg dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan gaji	13 Unit	Kota Sawahlunto	
								Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit		
								Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit		
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	4 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	12 Bulan		
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah peralatan gedung kantor yang	12 bulan		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							
							7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah dokumen profile kecamatan	1 buku	Kota Sawahlunto	
								Jumlah dokumen yang	1 dokumen		
								Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang	1 keg		
								Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi	3 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang	1 keg		
								Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	1 keg		
								Jumlah rapat koordinasi yang	4 kali		
								Jumlah rapat koordinasi yang	4 kali		
								Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan gaji non pns administrasi	6 Kali		
								Jumlah rapat koordinasi yang	4 kali		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	7 Kali	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Cabang Lomba yang diadakan	10 cabang		
								Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ	100 cabang		
								Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ	10 cabang		
								Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan dan gaji non pns administrasi pemberdayaan	10 Cabang		
								Jumlah kegiatan keagamaan yang	3 kegiatan		
								Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk.	10 kegiatan		
								Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk.	2 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk.	1 keg		
								Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	3 kali		
								Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	6 kali		
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana							
							7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah jaringan sistem informasi publik kecamatan yang dibuat/website	1 buah	Kota Sawahlunto	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan perizinan yang difasilitasi dan gaji non pns administrasi pelayanan yang	13 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Pelayanan perizinan dan Non	12 bulan		
								Operasional Penunjang Kegiatan Kelurahan	12 bulan		
								Operasional penunjang kegiatan Kelurahan	12 Bulan		
								Operasional penunjang kegiatan Kelurahan	12 Bulan		
								Operasional penunjang kegiatan Kelurahan	12 Bulan		
								Operasional penunjang kegiatan Kelurahan	12 Bulan		
								Jumlah Pelayanan perizinan yang	12 bulan		
								Jumlah Pelayanan perizinan yang	12 bulan		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan							
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	10 Program	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	10 program		
								Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota	6 kegiatan		
								Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang di	1 Orang		
								Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang	4 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota	7 keg		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota	4 Kegiatan		
								Jumlah operasional DPC LPM yang	12 bulan		
								Jumlah operasional DPC LPM yang	12 Bulan		
								Jumlah operasional DPC LPM yang	12 bulan		
								Jumlah operasional DPC LPM yang	12 bulan		
								Jumlah Program Pokok RPK yang difasilitasi	10 program		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan							
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur yang	12 bulan	Kota Sawahlunto	
								Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan	12 Bulan		
								Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan	12 Bulan		
								Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan	12 Bulan		
								Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan Kelurahan	12 Bulan		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang di	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di	12 bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan							
							7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Linmas yang dibina dan gaji non pns yang dibayarkan	100 orang	Kota Sawahlunto	
								Jumlah Linmas yang dibina	110 orang		
								Jumlah Linmas yang dibina (orang)	110 orang		
				7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan							
							7.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Linmas yang dibina	50 orang	Kota Sawahlunto	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala							
							7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan	1 kegiatan	Kota Sawahlunto	
								Jumlah hari-hari besar Nasional yang	1 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi							
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Prostitusi, dan Perdagangan Manusia	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan)	12 Bulan	Kota Sawahlunto	
								terkoordinasinya kegiatan antar umat	12 Bulan		

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1	2	3	4
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	134.019.172.901	
1.01.0.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN	134.019.172.901	
1.01.0.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN	134.019.172.901	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.702.834.181	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.475.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.475.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.636.959.181	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.598.384.181	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.038.575.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.291.000.000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.000.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	673.000.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.400.000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.400.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	27.063.313.720	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.311.801.111	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	320.000.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.985.000.000	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	50.000.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	454.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.249.000.000	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	461.975.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5.835.374.111	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	276.127.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	382.920.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	290.705.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.650.708.609	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	125.000.000	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	750.000.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	770.475.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	222.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.950.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	50.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.165.060.609	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	29.648.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	152.545.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.435.980.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.065.875.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	240.000.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	570.000.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	280.000.000	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	64.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	70.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	413.400.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	40.125.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	388.350.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.034.929.000	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	387.100.000	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	500.829.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	16.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.253.025.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.253.025.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.253.025.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	151.182.769.230	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	74.344.265.863	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	74.344.265.863	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.058.976.863	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.718.976.863	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.718.976.863	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.000.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	530.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	29.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	29.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.285.289.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.288.639.000	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	200.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.248.639.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.796.650.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.796.650.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	200.000.000	
1.02.2.14.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	76.838.503.367	
1.02.2.14.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	68.461.239.667	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.295.423.367	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.409.593.367	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.055.503.367	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354.090.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.980.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.550.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.240.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.620.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.270.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.300.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.110.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	366.740.000	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.370.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.400.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.550.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.850.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.340.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.011.010.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	797.470.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.860.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.231.206.300	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.789.800.000	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	17.313.800.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.550.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.750.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	176.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.198.481.300	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.350.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	179.770.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	103.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	75.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.160.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.250.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	85.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.510.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38.500.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	101.975.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	30.000.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.000.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	136.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	198.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.912.260.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	198.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.143.706.300	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	550.000.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	85.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	159.925.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	110.475.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	49.450.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	20.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	63.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	165.870.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.750.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.750.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.120.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.120.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	185.250.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.000.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.000.000	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	22.000.000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	22.000.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.750.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.750.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	85.000.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	85.000.000	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.500.000	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.500.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	15.000.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	15.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	583.490.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	215.000.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	215.000.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.490.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	185.490.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	183.000.000	
1.02.2.14.0.00.01.01	UPTD INSTALASI FARMASI KOTA	925.470.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	925.470.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	635.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	225.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	410.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	290.470.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	290.470.000	
1.02.2.14.0.00.01.02	UPTD PUSKESMAS KOLOK	888.454.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	888.454.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	888.454.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	428.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	459.504.000	
1.02.2.14.0.00.01.03	UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	1.304.970.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.304.970.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.304.970.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	730.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	574.020.000	
1.02.2.14.0.00.01.04	UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG	1.422.672.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.422.672.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.422.672.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	660.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	762.172.000	
1.02.2.14.0.00.01.05	UPTD PUSKESMAS TALAWI	2.038.576.900	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.038.576.900	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.038.576.900	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.250.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	788.576.900	
1.02.2.14.0.00.01.06	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	981.410.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	981.410.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	981.410.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	566.510.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	414.900.000	
1.02.2.14.0.00.01.07	UPTD PUSKESMAS LUNTO	815.710.800	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	815.710.800	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	815.710.800	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	419.090.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	396.620.800	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.604.705.802	
1.03.2.15.2.10.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	84.604.705.802	
1.03.2.15.2.10.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.756.230.802	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.303.804.302	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.186.154.927	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.327.179.927	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.858.975.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.259.375	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.350.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.880.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.600.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.129.375	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.500.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.366.625.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.625.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.324.000.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.765.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	398.185.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.850.000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.730.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.910.925.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.950.000.000	
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	250.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	300.000.000	
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	440.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.960.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.960.925.000	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.100.000.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.860.925.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.376.757.500	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.376.757.500	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	3.000.000.000	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	880.730.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	496.027.500	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.526.434.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.526.434.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.526.434.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.990.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.990.000.000	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.590.000.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	300.000.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.737.900.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.737.900.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.737.900.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.745.810.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.745.810.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	391.885.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.353.925.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	40.000.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	40.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.306.575.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37.306.575.000	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.500.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	2.365.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	13.670.000.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	6.268.000.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.055.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.958.575.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	6.190.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	300.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	818.025.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	545.100.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	400.000.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	45.100.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	90.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	152.925.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	152.925.000	
1.03.2.15.2.10.01.01	UPTD ALAT BERAT	848.475.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	848.475.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.500.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.500.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.975.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	804.975.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.793.081.285	
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.793.081.285	
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16.880.131.285	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.507.931.285	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.656.570.963	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.831.295.963	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	825.275.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.510.322	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.732.640	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.940.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.646.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.801.682	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.390.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.550.000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	143.050.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.000.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.300.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	771.100.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	272.500.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	272.500.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	272.500.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	602.500.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	40.000.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	40.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	562.500.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	562.500.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.837.500.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.837.500.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.837.500.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.659.700.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.659.700.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.659.700.000	
1.04.2.10.2.11.01.01	UPTD RUSUNAWA	912.950.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	912.950.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	912.950.000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	572.950.000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	340.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.626.119.925	
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.107.771.063	
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.107.771.063	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.754.572.513	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.313.154.845	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.220.813	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.934.032	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.000.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	197.500.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.500.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.867.688	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.625.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.210.188	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.832.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.200.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.806.532	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.947.688	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.458.844	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.743.448	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.743.448	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.446.940.198	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.353.165.198	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.181.452.698	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	29.122.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	142.590.500	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	68.275.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.375.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.900.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.500.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.500.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	906.258.352	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	881.749.352	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.300.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	854.449.352	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.509.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	24.509.000	
8.01.1.05.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.518.348.862	
8.01.1.05.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.518.348.862	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	913.899.060	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.823.550	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.402.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.892.925	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.924.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.604.625	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.520.360	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.716.360	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.804.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.555.150	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.665.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.890.150	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	14.604.449.802	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	166.211.313	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	166.211.313	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.971.736.720	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	199.650.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	195.000.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	295.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	209.550.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.912.536.720	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.461.501.769	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	450.000.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	869.963.141	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	141.538.628	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5.000.000	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.756.915.031	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.756.915.031	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.756.915.031	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.111.341.531	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.083.991.531	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.751.421.531	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	332.570.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.350.000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.350.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.000.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	307.125.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	307.125.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.125.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.000.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	265.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.220.698.500	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	928.208.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	67.000.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	22.500.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	139.490.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36.475.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	447.743.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	200.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	292.490.500	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	150.000.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	142.490.500	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	33.890.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.890.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33.890.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	83.860.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83.860.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83.860.000	

1	2	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.009.516.752	
2.18.2.07.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	8.009.516.752	
2.18.2.07.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	8.009.516.752	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.748.376.752	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.288.920.382	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.170.382	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.750.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.000.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.021.370	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.250.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.576.050	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.296.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.954.500	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.944.820	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	500.000.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.430.000	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.450.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.980.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.005.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.080.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.925.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	46.175.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	46.175.000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	46.175.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	859.100.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	859.100.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	769.500.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	89.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	307.925.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	22.175.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	22.175.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	172.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	112.000.000	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	113.750.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	113.750.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	47.940.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.000.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.000.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.940.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.740.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.147.754.200	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.147.754.200	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.147.754.200	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	400.007.240	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	36.155.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36.155.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.120.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	27.120.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	336.732.240	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	336.732.240	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	523.979.460	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	309.004.460	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.456.700	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83.547.760	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.500.000	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.500.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.475.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.475.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	101.557.500	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	78.707.500	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.532.500	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55.175.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.850.000	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.850.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	122.210.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.210.000	
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22.210.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.748.110.141	
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12.748.110.141	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	12.748.110.141	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.311.904.141	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.321.144.141	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.783.352.141	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	537.792.000	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.750.000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.250.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.000.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.500.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.538.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.796.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.742.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.472.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	514.000.000	
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.472.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	32.245.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.245.000	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	5.000.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	27.245.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	348.686.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	106.000.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	6.000.000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	100.000.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	42.900.000	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	7.900.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	199.786.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	161.500.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	38.286.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.275.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	4.000.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.275.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6.275.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	478.275.000	
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	478.275.000	
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	478.275.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	21.000.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	117.275.000	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.275.000	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	117.275.000	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	50.000.000	
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	200.000.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	200.000.000	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	200.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	90.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	80.000.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.315.543.683	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.315.543.683	
1.04.2.10.2.11.01.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.915.543.683	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	80.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	80.000.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	50.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	30.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	72.551.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.551.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	22.551.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.000.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.586.975.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.586.975.000	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	164.745.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.125.045.000	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	297.185.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	16.000.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	128.775.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128.775.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.500.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	117.275.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.348.483	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.348.483	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	75.348.483	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.830.894.200	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.830.894.200	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	50.000.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.505.188.200	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.275.706.000	
1.04.2.10.2.11.01.02	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	400.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.386.709.862	
2.12.5.04.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.386.709.862	
2.12.5.04.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.386.709.862	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.678.742.862	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.686.717.362	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.516.820.362	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.897.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.306.500	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.564.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.055.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.628.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.502.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.057.500	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.000.000	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.000.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.649.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.285.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.364.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.070.000	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.845.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.825.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	349.057.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	64.000.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	64.000.000	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	60.413.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	60.413.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	224.644.000	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	164.789.000	
2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	59.855.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	239.950.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	239.950.000	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	239.950.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	118.960.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.960.000	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	52.960.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.000.000	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.944.325.103	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.944.325.103	
1.06.2.13.2.08.01.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.944.325.103	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.302.218.603	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.302.218.603	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62.380.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	31.133.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	147.140.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	329.785.603	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	382.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	248.780.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	80.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	642.106.500	

	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	642.106.500	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	90.500.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	18.545.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.787.500	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	527.274.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.162.610.000	
1.02.2.14.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.162.610.000	
1.02.2.14.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.162.610.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	93.475.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25.000.000	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	25.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	68.475.000	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	68.475.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.788.635.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.593.310.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.533.310.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	135.325.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	135.325.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	280.500.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	280.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	60.000.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55.000.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	165.500.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.026.753.623	
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	9.026.753.623	
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	9.026.753.623	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.668.606.233	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.476.529	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.743.076.529	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.400.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.000.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118.000.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.960.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.500.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.460.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.100.000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.069.704	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.269.704	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.800.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.158.147.390	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5.825.000	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5.825.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.596.438.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	725.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	871.438.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.655.895.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.425.895.000	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	882.113.250	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	37.763.250	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	844.350.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7.480.000	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	7.480.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.396.140	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.396.140	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	200.000.000	
2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.981.664.500	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	2.603.724.500	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	2.603.724.500	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	559.869.500	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	559.869.500	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	364.074.500	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	48.795.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.000.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.043.855.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.043.855.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	193.855.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.850.000.000	
4.02.2.16.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	377.940.000	
4.02.2.16.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	377.940.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	377.940.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	377.940.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	311.940.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	66.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.662.742.264	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.662.742.264	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.662.742.264	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.872.803.631	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.211.989.631	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.423.631	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	254.566.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.000.000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.961.000	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.087.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.530.500	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.058.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.185.500	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.100.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.786.000	
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.786.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.967.000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130.167.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.800.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.100.000	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	94.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	94.000.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	94.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	122.719.900	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	122.719.900	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.350.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	106.369.900	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	145.420.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.420.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	145.420.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	338.000.500	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	338.000.500	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	40.764.500	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	297.236.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	89.798.233	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	89.798.233	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	89.798.233	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	830.191.000	
2.18.2.07.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	830.191.000	
2.18.2.07.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	830.191.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	110.622.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	110.622.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	110.622.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	162.632.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.632.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	162.632.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	511.287.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	511.287.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	400.125.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	27.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	74.162.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	45.650.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.650.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.650.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.601.792.657	
3.26.2.19.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.601.792.657	
3.26.2.19.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.601.792.657	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.640.148.425	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.867.400	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.867.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.015.878.733	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.827.478.733	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.400.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.586.662	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.677.700	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.769.562	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.567.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.712.400	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.760.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.100.000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.152.000	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	298.352.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.663.630	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.455.630	
2.19.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.300.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.708.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.200.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.468.369.232	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.435.650.000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	543.550.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	167.100.000	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	725.000.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.719.232	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	32.719.232	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.003.275.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	50.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	260.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	990.000.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	910.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.000.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	300.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	403.275.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	403.275.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	490.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	490.000.000	
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	490.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.499.950	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	75.499.950	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	75.499.950	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75.499.950	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.499.950	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	75.499.950	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	63.545.000	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	63.545.000	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	63.545.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	63.545.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.545.000	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.465.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.080.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.785.512.416	
2.22.0.00.0.00.01.00	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	9.785.512.416	
2.22.0.00.0.00.01.00	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN	9.785.512.416	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.538.581.166	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.255.866	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.238.830.866	
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.425.000	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000	
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.217.300	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	518.217.300	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.900.000	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.378.000	
2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.378.000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.600.000	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.000.000	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.600.000	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.130.000	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.130.000	
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	874.508.500	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	593.992.500	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	593.992.500	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.516.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	175.400.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	105.116.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	617.925.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	617.925.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	617.925.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	140.635.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	140.635.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	140.635.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.589.682.500	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21.637.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	21.637.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.568.045.500	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	1.102.837.500	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	465.208.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.024.180.250	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.024.180.250	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	254.665.000	
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	70.261.250	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	42.600.000	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.656.654.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.507.651.596	
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.507.651.596	
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.507.651.596	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.016.651.596	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.942.596	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.170.242.596	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.700.000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.500.000	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.000.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.500.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.100.000	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.600.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.109.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.609.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.500.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	481.000.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	331.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.000.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.675.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	13.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	125.325.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	15.000.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	40.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	85.000.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25.000.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10.000.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	184.825.000	
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	184.825.000	
2.23.2.24.0.00.01.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	184.825.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	114.825.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	50.000.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	15.000.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	15.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	34.825.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	34.825.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	15.000.000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25.000.000	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	30.000.000	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	30.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	537.460.000	
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	537.460.000	
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	537.460.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	487.460.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	487.460.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.460.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	50.000.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.118.363.056	
3.26.2.19.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.118.363.056	
3.26.2.19.0.00.01.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.118.363.056	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.457.000.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	210.000.000	
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.247.000.000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.600.000.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.597.000.000	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.407.235.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.407.235.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	346.875.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.007.360.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	53.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	144.925.000	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	144.925.000	
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	144.925.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.109.203.056	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.109.203.056	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	763.375.000	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	75.000.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	270.828.056	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.662.522.000	
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8.662.522.000	
2.09.3.27.3.25.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8.662.522.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.659.082.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	528.520.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	15.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	513.520.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	970.522.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	169.942.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	463.520.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	337.060.000	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100.000.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.040.000	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	260.040.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.800.000.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.800.000.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.739.166.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	144.166.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	144.166.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.595.000.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	910.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.150.000.000	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1.300.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	235.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	495.334.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	140.000.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.334.000	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20.000.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	255.334.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	80.000.000	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	45.000.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	35.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	186.294.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	186.294.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	186.294.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	582.646.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	582.646.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100.000.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	70.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	392.646.000	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	20.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.946.858.000	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.946.858.000	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.946.858.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.024.332.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.024.332.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	924.332.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	189.264.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	189.264.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	89.264.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	310.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	310.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	169.562.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	169.562.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	169.562.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	253.700.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	253.700.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	253.700.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.917.699.500	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.917.699.500	
2.17.3.30.3.31.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.917.699.500	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.400.541.500	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.400.541.500	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	150.000.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	714.520.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	536.021.500	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	457.158.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	457.158.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	457.158.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	60.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	32.173.469.378	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	32.173.469.378	
4.01.2.16.2.20.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	32.173.469.378	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.889.846.028	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.719.235.801	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.335.660.826	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	377.825.000	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.749.975	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.825.000	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	361.825.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.565.408.388	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.538.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.077.990.388	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.275.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	152.500.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	498.730.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.247.675.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.288.700.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.685.261.837	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.261.837	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.437.372.500	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98.604.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.015.268.500	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.500.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.985.955.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.003.480.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	922.475.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	874.993.002	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.893.002	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.100.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	476.475.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	260.475.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	216.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	371.844.500	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	90.524.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105.191.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	176.129.500	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	411.475.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	201.000.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	210.475.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.480.353.475	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	297.222.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	165.824.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	111.576.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	19.822.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.831.634.975	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.098.659.975	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4.506.851.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.226.124.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	321.711.500	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	92.150.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	152.725.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	76.836.500	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	29.785.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	29.785.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	803.269.875	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	151.919.875	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	95.964.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.466.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	40.489.875	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	59.125.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	59.125.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	592.225.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	109.600.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	153.400.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	329.225.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	27.342.077.693	
4.02.2.16.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	27.342.077.693	
4.02.2.16.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	27.342.077.693	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.856.216.293	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.756.573.093	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.756.573.093	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	670.000.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	550.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.287.200	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.256.200	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.512.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.947.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	313.572.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.563.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	563.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	944.079.000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	503.329.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.000.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.750.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.470.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	445.500.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.196.800	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.773.200	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	597.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.000.000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	30.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	985.807.000	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	41.382.000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	263.825.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	392.600.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	288.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.485.861.400	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	291.960.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	144.800.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	147.160.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.436.835.400	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	2.031.574.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	405.261.400	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.000.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	305.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.460.292.000	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.400.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	88.750.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	958.042.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	13.500.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	243.474.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	243.474.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.748.300.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.748.300.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	7.810.186.194	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.810.186.194	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.810.186.194	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.494.361.194	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.764.986.156	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.564.236.156	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.750.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	904.720.038	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.035.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.775.663	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.065.500	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.343.875	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681.500.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.735.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.920.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.000.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.163.000.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	910.000.000	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	75.000.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100.000.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	60.000.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	675.000.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85.000.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	168.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	168.000.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.152.825.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	376.850.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.850.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	350.000.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	90.000.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	70.000.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	35.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	425.975.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235.975.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	35.000.000	
5.02	KEUANGAN	89.019.441.240	
5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.019.441.240	
5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	89.019.441.240	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.295.959.490	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.628.118.541	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.139.028.588	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	489.089.953	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.500.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.500.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.471.949	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.187.500	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.466.449	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.655.500	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.162.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.750.000	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.000.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.750.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.548.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177.698.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.850.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.571.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.071.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.500.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	79.126.484.150	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.584.425.650	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	227.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.072.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58.525.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58.525.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58.525.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58.525.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	266.867.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	282.306.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	349.080.650	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	120.693.500	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10.000.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15.348.500	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.076.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	32.019.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.250.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	307.200.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	13.000.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.000.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	213.200.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50.000.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	11.000.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	77.021.865.000	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.500.000.000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	69.765.148.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.500.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.256.717.000	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	92.300.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	92.300.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	594.616.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	594.616.000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	5.800.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.500.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.608.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	143.708.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	420.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.002.381.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.002.381.600	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	22.924.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	39.500.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40.500.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	53.469.600	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	491.291.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.760.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	15.330.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	13.979.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.776.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	224.852.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.773.766.415	
5.03.0.00.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.773.766.415	
5.03.0.00.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.773.766.415	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.178.044.415	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.058.219.415	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.897.819.415	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.400.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.570.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.400.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.980.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.750.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	34.440.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.173.000	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.173.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.502.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.852.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.650.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.580.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.930.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.650.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.000.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.595.722.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	344.534.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	196.230.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	24.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	124.304.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	241.330.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	219.125.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	22.205.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	699.858.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	191.037.000	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	331.780.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.000.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	137.041.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	310.000.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	200.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	110.000.000	
2.12.5.04.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.000.000	
2.12.5.04.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.000.000	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000	
5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
5.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	60.000.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	60.000.000	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	199.000.000	
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	199.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	199.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	199.000.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	199.000.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	124.000.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	75.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.237.135.917	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT	6.237.135.917	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT	6.237.135.917	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.237.486.027	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.029.451.535	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.891.651.535	
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.800.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	533.200.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	533.200.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.552.500	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.052.500	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.500.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.575.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.575.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.152.492	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.900.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.199.992	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.052.500	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.554.500	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.554.500	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.500.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	654.149.890	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	654.149.890	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	592.688.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	61.461.890	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	345.500.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	345.500.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	306.500.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	30.677.726.334	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN BARANGIN	10.331.008.909	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN BARANGIN	5.403.568.909	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.761.388.909	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.363.534.340	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.247.534.340	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.754.569	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.254.569	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.900.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.700.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.200.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.400.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	454.500.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	374.700.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	78.600.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.100.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.800.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	79.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	107.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.100.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.100.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.100.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.080.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.080.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.200.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.880.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.500.000	
7.01.0.00.0.00.01.01	KELURAHAN DURIAN 1	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	286.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.02	KELURAHAN DURIAN 2	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	286.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.01.03	KELURAHAN LUBANG PANJANG	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	286.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.04	KELURAHAN SARINGAN	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	286.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	14.180.317.957	
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	6.789.157.957	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.273.977.957	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.888.022.957	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.787.222.957	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.800.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.425.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.700.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.850.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.075.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.300.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.125.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.125.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.905.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.905.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	326.295.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	285.860.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.860.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	227.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.435.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.435.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.175.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.175.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.175.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.710.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.710.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.710.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.01	KELURAHAN AIR DINGIN	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.02.02	KELURAHAN AUR MULYO	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	
7.01.0.00.0.00.02.03	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	
7.01.0.00.0.00.02.04	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	
7.01.0.00.0.00.02.05	KELURAHAN PASAR	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	
7.01.0.00.0.00.02.06	KELURAHAN TANAH LAPANG	1.231.860.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	865.860.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	865.860.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	865.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	366.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	256.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.800.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN SILUNGKANG	2.863.108.101	
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN SILUNGKANG	2.863.108.101	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.394.203.101	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.828.101	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.328.101	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.500.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.750.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.750.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.725.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.725.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.900.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.450.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.450.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	292.755.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235.155.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	61.155.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	174.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.600.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	57.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.150.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.150.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.150.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.500.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.500.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.500.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000	
7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN TALAWI	3.303.291.367	
7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN TALAWI	3.303.291.367	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.496.431.392	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.051.831.392	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.946.206.392	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.625.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.075.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.575.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.550.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.550.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.475.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.475.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	539.987.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	464.037.500	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.037.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	440.000.000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	20.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55.950.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	55.950.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.175.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.175.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.175.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.148.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.148.500	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.148.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.548.975	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.548.975	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	47.425.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.123.975	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.198.506.943	
8.01.1.05.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.198.506.943	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.1.05.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.198.506.943	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.655.338.570	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.650.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.650.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.649.688.570	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.430.363.690	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.324.880	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	311.112.450	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	311.112.450	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	311.112.450	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.232.055.923	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.232.055.923	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.232.055.923	

